DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI I

# RENCANA STRATEGIS 2020-2024

https://ditjenpkh.pertanian.go.id

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024. Tahun 2020-2024 merupakan periode yang cukup strategis dalam rangka menyongsong tahun 2045 yang diprediksikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia Tahun 2042. Pada saat itu, PDB Indonesia telah mencapai 9,1 juta US$ dan pendapatan/kapita Rp 27 juta/tahun serta penduduk berjumlah 310 juta jiwa.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari sektor pertanian akan mengikuti terus perubahan-perubahan yang akan terjadi terutama perubahan kebijakan dan teknologi. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pembangunan pertanian, salah satunya subsektor peternakan. Hal ini menyebabkan perubahan pada fokus kegiatan, struktur anggaran dan kebijakan lainnya Ditjen PKH, sehingga dilakukan revisi Renstra Ditjen PKHTahun 2020-2024.

Revisi I Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 menyelaraskan dengan Revisi Renstra Kementan Tahun 2020-2024 untuk indikator dan targetnya. Dengan demikian, penyusunan Revisi I Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

Jakarta, 9 Desember 2020
Direktur Jenderal,

Nasrullah

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 13973/Kptn/BK.200/F/12/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 Telah ditetapkan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan pada Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/KPTS/RC.020/M/11/2020 sehingga perlu penyesuaian Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor13967/KPTS/ HK.160/F/8/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M /05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/KPTS/ RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M /05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020–2024.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13967/KPTS/HK.160/F/8/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020–2024.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 December 2020

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

NASRULLAH
NIP 19660223 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inpektur Jenderal Kementerian Pertanian.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** i
**KEPUTUSAN DIRJEN PKH** ii
**DAFTAR ISI** vi
**DAFTAR TABEL** vii
**DAFTAR GAMBAR** vii

**BAB I PENDAHULUAN** 1
1.1. Kondisi Umum 2
1.1.1. Kinerja Ekonomi Makro 2
1.1.2. Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan 4
1.2. Potensi dan Permasalahan 9
1.2.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang) 9
1.2.2. Permasalahan 11

**BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** 17
2.1. Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 17
2.2. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 18
2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan 20
2.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (SP dan IKSP) 24

**BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN** 29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 33
3.2. Dukungan Peternakan dan Keswan dalam Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Nasional 37
3.3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan 38
3.3.1. Kerangka Regulasi 38
3.3.2. Kerangka Kelembagaan 40

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** 43
4.1. Target Kinerja 43
4.2. Kerangka Pendanaan 44

**BAB V PENUTUP** 47

**LAMPIRAN**
LAMPIRAN 1 50-97
LAMPIRAN 2 98-108

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 23 |
| Tabel 2.2 | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program | 27 |
| Tabel 3.1 | Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH | 32 |
| Tabel 3.2 | Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH | 36 |
| Tabel 3.3 | Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi | 38 |
| Tabel 4.1 | Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 45 |


# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing | 3 |
| Gambar 3.1 | Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP) | 30 |
| Gambar 3.2 | Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH | 40 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 adalah unit kerja Eselon I yang berada dibawah Kementerian Pertanian, sesuai bagian ketujuh Pasal 20, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal PKH, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa susunan organisasinya terdiri dari satu orang Eselon I A, 6 orang Eselon II A, 26 orang Eselon III A, dan 61 orang Eselon IV A. Fungsi dari Ditjen PKH tersebut dirumuskan menjadi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Selain itu, Ditjen PKH berfungsi untuk pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Renstra Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, diwajibkan kepada Ditjen PKH untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJMN). Ditjen PKH sebagai salah satu Direktorat Jenderal Teknis yang menjabarkan kebijakan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH menyelaraskan Renstranya dengan Revisi Pertama Renstra Kementerian Pertanian

Tahun 2020-2024. Revisi dilakukan dengan pertimbangan: (1) terdapatnya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan terdapatnya perubahan dalam *focusing* kegiatan, struktur penganggaran dan kebijakan penting yang diambil pada sektor pertanian saat ini, (2) terdapatnya lag waktu proses terbitnya rencana strategis yang terbit lebih dahulu yaitu pada tanggal 04 Mei 2020 dibandingkan dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/ Lembaga, sehingga dipandang perlu adanya penyesuaian deskripsi terkait target maupun program dan (3) merespon dinamika kebijakan, dengan terdapatnya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Renstra Ditjen PKH sebagai pijakan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020-2024, yang juga menggambarkan secara utuh capaian kinerja pembangunan sebelumnya yakni : capaian kinerja makro maupun kinerja teknis. Kinerja makro, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sedangkan kinerja teknis berupa populasi, produksi dan tingkat konsumsi sebagai cerminan pelaksanaan kinerja fungsional yaitu aspek perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta dukungan kesekretariatan.

### 1.1.1 Kinerja Ekonomi Makro

#### 1. Produk Domestik Bruto

PDB sub sektor peternakan pada periode 2014-2018** menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB sektor pertanian. PDB sub sektor peternakan tahun 2014 mencapai sebesar Rp132.221,1 miliar meningkat menjadi sebesar Rp155.152,2 miliar atau meningkat 4,08% pertahun sedangkan PDB sektor pertanian Rp880.389,5 miliar meningkat menjadi Rp 1.005.440,8 miliar atau meningkat sebesar 3,37% pertahun (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).-

**2. Investasi**

Investasi sub sektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp326,4 miliar menjadi Rp1.503,2 miliar secara komulatif meningkat sebesar Rp726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%. (Sumber: BKPM diolah)

Sebagai gambaran investasi sektor peternakan periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1. 1 Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

**KINERJA INVESTASI SUBSEKTOR PETERNAKAN**

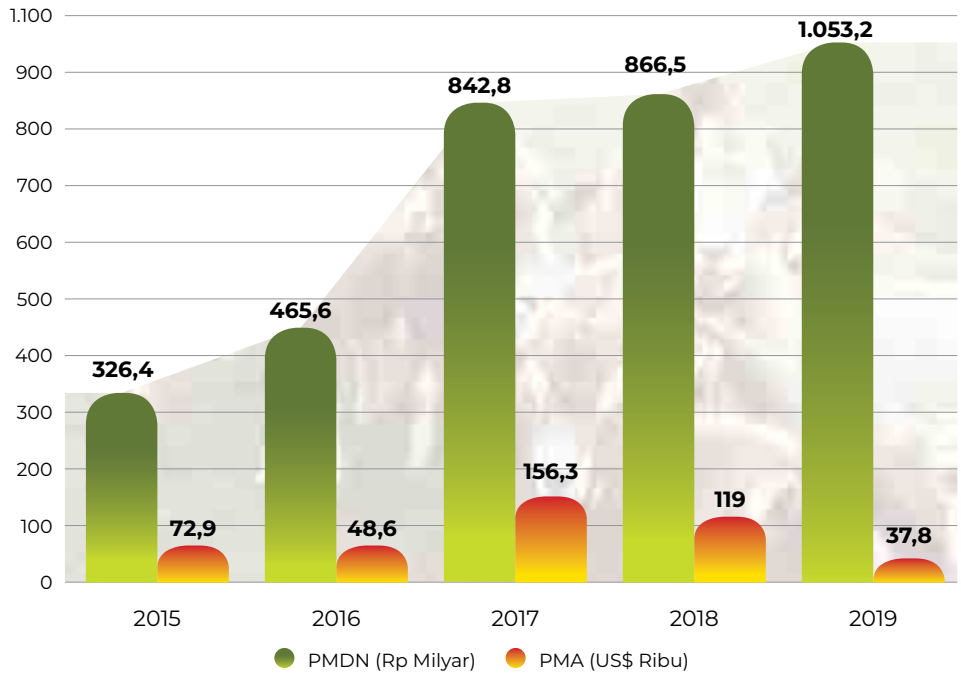

**3. Penyerapan Tenaga Kerja**

Dalam periode tahun 2014-2018, penyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan meningkat 4,18 pertahun, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.831.211 orang pada tahun 2018 (BPS, Sakernas-Februari). Berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja peternakan di dominasi oleh tenaga berpendidikan SD yaitu sebanyak 1.610.057 orang (33,3%), dengan kelompok umur yang didominasi oleh golongan umur tua (60 tahun ke atas) sebanyak 1.132.175.orang (23,75 %) dan apabila dilihat dari status pekerjaan utamanya adalah pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 1.736.149 orang (36,43 %) (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019)

**4. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)**

Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) periode 2019 sebesar 108,04 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 106,65. NTPT lebih dari 100 menunjukan peternak mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,26% (Sumber: BPS Tahun 2020).

### 1.1.2 Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan

**1. Populasi Ternak**

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak periode 2015-2019 terbesar yaitu ayam ras pedaging (23,39%) dan ayam ras petelur (18,41%), Untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,66% dan 2,05%. Untuk ternak kecil yang terdiri dari kambing , domba dan babi masing-masing tumbuh 0,02%; 1,29% dan 3,44%. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kerbau -1,65% dan kuda -2,14% (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).

**2. Produksi Ternak**

Berdasarkan pertumbuhan produksi ternak periode 2015-2019, jumlah produksi daging ayam ras pedaging mendominasi dengan rata-rata pertumbuhan 23,39% pertahun. Sedangkan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar

0,75% dan 9,20%. Untuk rata-rata pertumbuhan telur ayam ras petelur, ayam buras dan susu masing-masing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 4,56% (Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2019).

Sesuai dengan Renstra tahun 2014-2019, produksi ternak yang tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu telur sebesar 5.355,6 ribu ton (capaian 140,44%) dari target 3.770 ribu ton sedangkan target produksi ternak yang tidak tercapai yaitu: daging sapi/ kerbau sebesar 514,4 ribu ton (capaian 68,13%) dari target 755 ribu ton dan susu sebesar 996,44 ribu ton (capaian 93,69%) dari target 1.063,56 ribu ton.

Dari aspek konsumsi, konsumsi daging sapi menunjukan bahwa konsumsi daging selama 2014-2018 menunjukan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2014 konsumsi tersebut disetarakan dengan protein hewani menunjukan 2,68 gram protein. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 3,73 gram protein/ hari/kapita dan telur pada periode yang sama naik 3,17 gram/ kapita/hari menjadi 3,5 gram/kapita/hari (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).

**3. Sertifikasi Bibit Ternak**

Produksi benih dan bibit selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut : 1) Produksi benih : sebanyak 24.117.522 dosis atau 100,39% dari target 24.023.00 dosis untuk semen beku dan 5.495 embrio atau 171,62% dari target 3.202 embrio; dan 2) Produksi bibit : sapi potong sebanyak 4.522 ekor atau 114,37% dari target 3.954 ekor; sapi perah 1.467 ekor atau 122,25% dari target 1.200 ekor; kerbau 293 ekor atau 48,03% dari target 610 ekor; kambing perah 764 ekor atau 132,87 % dari target 575 ekor; kambing 1.209 ekor atau 104,68% dari target 1.155 ekor; babi 2.782 ekor atau 70,50% dari target 3.946 ekor; ayam 1.249.429 ekor atau 132,90% dari target 940.100 ekor; serta itik 2.169.993 ekor atau 133,53% dari target 1.625.057 ekor (Lakin Bitpro 2019 data diolah).

Selain produksi benih dan bibit, kinerja perbibitan dan produksi ternak juga dapat dilihat dari sertifikasi bibit yang dikeluarkan sebanyak 312 ekor sapi potong, 103 ekor kambing, 110 ekor domba, 2.755.000 straw semen beku dan 22 ekor babi. Selama kurun waktu tersebut ada sebanyak 16 rumpun galur ternak yang telah dikeluarkan (Lakin Bitpro 2019 data diolah)

**4. Status Kesehatan Hewan**

Upaya mendukung kegiatan status kesehatan hewan melalui pembebasan penyakit. Dalam periode 2015-2017 telah dilakukan pembebasan terhadap 14 wilayah untuk penyakit Rabies, AI, Brucellosis dan Septicemia Epizootica. Capaian kinerja status kesehatan hewan pada tahun 2019 sebesar 78,1% dari target 80%. Capaian status kesehatan hewan dibawah target dikarenakan beberapa hal antara lain: (1). Adanya wabah Rabies di beberapa lokasi di Provinsi NTB; dan (2). Adanya penurunan jumlah provinsi bebas rabies semula 9 Provinsi menjadi 8 Provinsi karena Provinsi NTB sebelumnya merupakan wilayah bebas Rabies

Disamping itu, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 87 kompartmen bebas AI untuk Breeding Farm aktif, yaitu: sebanyak 9 perusahaan GPS (Grand Parent Stock, 39 Perusahaan PS (Parent Stock), 18 perusahaan FS (Final Stock), 21 perusahaan Hatchery di 14 provinsi (Lakin Ditjen PKH 2019).

**5. Penjaminan Keamanan Pangan Strategis Nasional**

Upaya Penjaminan Produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan dilaksanakan melalui serangkaian upaya mulai dari pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi unit usaha dan produk hewan. Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus berasal dari unit usaha yang telah menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Selanjutnya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan, dan guna mendorong pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang diproduksi, dimasukkan dari dan/atau dikeluarkan ke luar negeri, dan yang diedarkan didalam negeri, juga dilakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan, pengawasan peredaran produk hewan serta monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan.

Sampai dengan tahun 2019, terdapat unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV sebanyak 2.453 unit usaha, meningkat 233 unit usaha dari tahun 2018 sebanyak 2.020 unit usaha. Sedangkan untuk jumlah kasus pangan segar asal hewan yang membahayakan kesehatan manusia terjadi penurunan kasus, dari 16 kasus di tahun 2018 menjadi 10 kasus di tahun 2019.

Terkait dengan monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan, telah dilakukan pengujian terhadap 30.745 sampel produk hewan, dengan hasil sebanyak 81% produk hewan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu dalam upaya memenuhi persyaratan kesehatan produk hewan untuk ekspor, pada tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak 3.439 Sertifikat Veteriner, yang meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3.332 Sertifikat Veteriner. Peningkatan penerbitan sertifikat veteriner ini menunjukan bahwa produk hewan asal Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor dan berdaya saing (Lakin Ditjen PKH 2019).

**6. Penyediaan Infrastruktur Peternakan**

Penyediaan infrastruktur peternakan tahun 2015-2019 diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana RPH-Ruminansia dan tempat pemotongan hewan kurban. Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yaitu RPH atau

fasilitas pemotongan hewan kurban berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit dengan pertimbangan bahwa RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban tersebut dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak ditargetkan sebesar 30%. Adapun realisasi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar 34,60% dari target 30% (tersedia sebanyak 178 unit) (Lakin Ditjen PKH 2019).

**7. Peningkatan Volume ekspor**

Capaian kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun 2019 sebesar 78,65 % atau meningkat 314,60 % dari target 25 % dan bila dilihat secara volume, ekspor tahun 2019 sebesar 32.491,14 ton meningkat dari tahun 2018 sebesar 29.145,04 ton. Apabila dilihat dari nilainya, ekspor hewani asal ternak tahun 2019 sebesar US$ 78.654.179,58 meningkat dari tahun 2018 sebesar US$ 71.190.478,16 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 62,92% (Lakin Ditjen PKH 2019).

Volume ekspor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari volume ekspor 7 (tujuh) komoditas, yaitu: ternak kambing, domba, babi, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick – DOC*), serta obat hewan. Ekspor ternak babi selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,83% per tahun.

Ekspor ternak kambing dan domba selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan untuk ternak kambing (95,85%) sedangkan ternak domba baru mulai diekspor pada tahun 2018 sebersar 81,5 ton. Telur ayam tetas, daging ayam dan produk olahannya serta obat hewan merupakan komoditas yang berkontribusi terhadap peningkatan volume ekspor pada tahun 2015-2019. Sedangkan DOC baru diekspor pada tahun 2018-2019 dengan tujuan ekspor adalah Timor Leste.

8. **Penurunan Volume Impor**

   Volume impor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari 9 (sembilan) komoditas, yaitu: susu, mentega, keju, yoghurt, sapi hidup, daging lembu, jeroan lembu, sosis, dan itik. Pada periode dua tahun (2018-2019), penurunan impor terjadi pada dua komoditas, yaitu itik dan yoghurt. Untuk komoditas daging lembu dan jeroan lembu, serta susu dan kepala susu belum mampu menurunkan vulome impor dikarenakan meningkatnya kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri. Selain itu, penyebab adanya peningkatan impor daging dan jeroan juga karena ada perubahan regulasi untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan WTO (*World Trade Organization*).

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk melihat potensi dan permasalahan pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilihat dari faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan peternakan. Lingkungan strategis internal mencakup aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal mencakup aspek ancaman dari luar dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis dengan metode SWOT, untuk memilih aspek aspek internal dan eksternal strategis untuk dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif strategi prioritas dalam mendukung kinerja pembangunan.

### 1.2.1. Potensi (Kekuatan dan peluang)

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain: jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman hayati, teknologi dan pasar luar negeri

1. Jumlah Rumah Tangga Peternakan 13,56 juta orang (Sutas, 2018)

   Peternakan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia secara turun menurun. Usaha peternakan dilakukan oleh masyarakat secara polivalen (terpadu) dengan kegiatan ekonomi lainnya di bidang pertanian. Dengan banyaknya masyarakat melakukan usaha peternakan walupun dengan skala yang kecil dan dikelola secara sambilan,

usaha peternakan ini memiliki peran dalam menopang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga peternakan sebanyak 13,56 juta rumah tangga atau sebesar 21,43% dari rumah tangga pertanian.

2. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragamanan genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
   Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar diwilayah-wilayah belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Dukungan sumber daya alam lainnya, utamanya dalam penyediaan pakan untuk pertumbuhan ternak sangat besar dengan keragaman yang cukup tinggi. Disamping itu, keragaman budaya dari masyarakat yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk pangan hasil ternak yang merupakan kekuatan penyediaan terhadap produk peternakan. Potensi ragamnya genetik ternak dan produk olahan asal ternak dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

3. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia.
   Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stabilisator merupan modal penting dalam menumbuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan utamanya bagi peternak rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan peternakan Indonesia.

   Untuk itu peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan peternakan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian peternak. Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan

cara: menciptakan iklim usaha yang memungkinkan peternak berkembang; meningkatkan kemampuan petenak melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan menciptakan kemitraan peternakan yang saling menguntungkan

4. Pangsa Pasar ekspor produk peternakan meningkat
   Pada periode 2015-2019, beberapa produk ternak mengalami peningkatan produksi antara lain daging ayam ras pedaging (23,39%), telur ayam ras petelur, ayam buras, daging kambing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 20,78. Kelebihan produksi ini dapat dijadikan peluang ekspor keluar negeri. Peluang ekspor semakin terbuka dengan status kesehatan hewan yang dimiliki Indonesia yaitu bebas penyakit list A (PMK). Peluang ekspor kambing dan domba sangat potensial mengisi segmen pasar di Asia dan Timur Tengah ditopang dengan keunggulan komparatif yang ada.

5. Kesadaran global tentang keamanan pangan (*food safety*), *bio security* dan kesejahteraan hewan
   Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. Pemerintah dan pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan pangan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan pangan yang aman dan berkualitas, penerapan cara yang baik di rantai produksi pangan termasuk penerapan kesejahteraan hewan menjadi faktor penting yang harus dilaksanakan.

### 1.2.2. Permasalahan

1. Usaha peternakan yang bersifat Subsiten dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak
   Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat

sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak.

Hasil SOUT 2017 menyebutkan bahwa partisipasi peternak yang mengikuti bimbingaan penyuluhan usaha peternakan hanya sebesar 5,65 %, dan dari jumlah tersebut 7,86% adalah peternak sapi potong. Informasi terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak. Sebanyak 82.13% peternak tidak mengikuti penyuluhan dan bimbingan teknis usaha peternakan dimana 79,73 % adalah peternak sapi potong. Alasan dominan peternak tidak mengikuti bimbingan dan penyuluhan usaha peternakan adalah peternak merasa tidak perlu dengan materi penyuluhan yang diberikan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan karena tanpa adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan ternak dan pengelolaan usaha peternakan melalui kegiatan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis dan manajemen usaha maka risiko ketidakberhasilan kegiatan harus dapat segera dimitigasi.

2. Rendahnya pemanfaatan plasma nutfah sebagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan secara ekonomis.
   Indonesia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah ternak yang tersebar di wilayah Indonesia, namun keunggulan komparatif ini belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk didorong sebagai keungulan kompetitif dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan pengembangan dan kontribusi plasma nutfah ternak Indonesia, dapat dilakukan pengembangan dan perbaikan mutu genetik secara terus menerus, sekaligus dikembangkan secara ekonomis melalui kawasan sumber bibit ternak.

3. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan.
   Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

4. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan dan liberalisasi pasar
   Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Persaingan dan liberalisasi berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi sehingga arus informasi dan transportasi ke negara lain semakin dekat, terutama masuknya barang-barang luar negeri. Selain itu, Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor hasil ternak terutama daging sapi, ternak hidup, dan bibit ayam ras. Dari sisi industri, Indonesia mengimpor kulit ternak, bahan baku pakan asal ternak seperti *meat meal* dan *bone meal*, tepung ikan, jagung dan berbagai *feed suplement* pakan ternak. Ketergantungan bahan utama industri dari impor ini sangat mempengaruhi perkembangan peternakan dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketergantungan impor produk peternakan, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.

5 Lemahnya Posisi dalam Perjanjian Internasional
   Terbukanya pasar global harus disertai persiapan yang matang terutama perjanjian internasional utamanya dalam

hal perdagangan atau arus barang. Perjanjian yang tidak disikapi dengan matang dan lemahnya posisi tawar akan mengancam industri peternakan dalam negeri dan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota *Word Trade Organization* (WTO) harus mengantisipasi fenomena dan dinamika perkembangan internasional maupun regional terutama dalam bidang perdagangan hewan dan produknya melalui reorientasi terhadap kebijakan perdagangan dengan memfokuskan perhatian terhadap salah satu aspek yang sangat penting dari perjanjian GATT yaitu "Perjanjian tentang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan" (Sanitary and Phytosanitary/ SPS).

Dari aspek kesehatan hewan, meningkatnya lalu lintas hewan dan produknya akan membawa risiko masuknya penyakit hewan ke wilayah Indonesia. Indonesia yang telah dinyatakan bebas terhadap 13 dari 15 penyakit hewan menular menurut daftar A dan beberapa penyakit menurut daftar B dari OIE (*Office Internationale des Epizooties*) perlu mengantisipasi melalui reorientasi kebijakan dengan menepati kesepakatan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* untuk keamanan pangan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan.

# BAB II
## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

# BAB II
# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

## 2.1. VISI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya, harus selaras dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2020-2024, untuk visi yaitu :
***"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan:
***"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".***

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut:
***"Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern"***.

**Visi Ditjen PKH bermakna**:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat

3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

## 2.2. MISI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.**

   Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. **Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan**

   Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. **Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.**
   Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara.

   Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. **Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.**
   Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejehteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. **Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing**
   Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional.

   Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. **Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.**
   Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

   Misi Ditjen Peternakan dan Keswan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian.

## 2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup :

1. **Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas**
   Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi. Untuk itu kualitas, kuantitas dan

kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus dapat diwujudkan dengan baik. Upaya untuk penyediaan bibit dan benih ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik secara teknis maupun manajerial.

2. **Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan**

   Pakan merupakan faktor penting didalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, murah dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan pakan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan menunjang peningkatan produksi.

3. **Meningkatnya kesehatan hewan**

   Peningkatan kesehatan hewan ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (zoonosis).

   Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. **Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.**
   Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. **Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.**
   Produk peternakan baik pangan maupun non pangan harus mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari luar, untuk itu peningkatan kualitas dan daya saing produk harus dapat diwujudkan. Disamping untuk penyediaan dalam negeri diharapkan produk peternakan juga mampu diekspor untuk pasar luar negeri. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk dilakukan melalui peningkatan SDM, pemenuhan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi modern mulai dari proses pengolahan sampai distribusi pemasaran.

6. **Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.**
   Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, maka perbaikan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek kelembagaan, SDM, tata kelola aset, kebijakan, program dan penganggaran akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.

   Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator tujuan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

| Visi | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan |
|---|---|---|---|
| **Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan** | 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas bibit/ benih ternak secara berkelanjutan | 1. Tersedianya bibit/ benih ternak berkualitas dan berkesinambungan | 1. Jumlah bibit/benih ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat) |
| | 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pakan secara berkelanjutan | 2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan | 2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas (indeks) |
| | 3. Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat | 3. Meningkatnya kesehatan hewan | 3. Status Kesehatan Hewan (%) |
| **Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan** | 4. Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat | 4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional | 4. Jaminan kesehatan masyarakat veteriner (%) |
| | 5. Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing | 5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing | 5. Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton) |
| | | | 6. Ekspor produk peternakan (US$) Kuantitatif |
| | 6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional | 6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai *roadmap* RB Kementan | 7. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks) |

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan misi serta tujuannya merupakan mata rantai yang saling mendukung. Untuk mencapai visi dimaksud maka misi yang dibebankan kepada Ditjen PKH dan tujuan yang diinginkan beserta indikator tujuannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## 2.4. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (SP DAN IKSP)

Berdasarkan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH memiliki Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah terbentuknya program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama kurun waktu 2020-2024 dan program tersebut memiliki kegiatan. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based*). Adapun berbagai sasaran program tersebut adalah:

1. **Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.**

   Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

   Target capaian produksi kurun waktu 2020-2024 dengan peningkatan produksi daging (1,28%); susu (2,9%), dan telur (2,16%) dan target produksi masing- masing komoditas setiap provinsi dapat di Lampiran 1. Dengan rata-rata pertumbuhan daging tersebut maka sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN baik target produksi dan kontribusi angka kecukupan protein hewani dapat tercapai.

2. **Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.**

   Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

3. **Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.**

   Kinerja Keamanan dan Mutu Pangan diukur berdasarkan persentase pangan asal hewan (definisi hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya indeks keamanan dan

mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan "halal" (definisi ASUH) (SP3 dan SS3).

4. **Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan**
   Tersedianya sarana prasarana peternakan Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana dari hulu sampai hilir dalam sistem produksi ternak diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

5. **Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.**
   Sasaran program ini indikatornya adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

6. **Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia**
   Sasaran program ini adalah terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dengan indikator kinerja jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dapat mencapai sasaran strategis yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

7. **Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.**
   Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai RB Ditjen PKH dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen PKH yang dilihat dari berapa nilai dari skala *likert*. Pencapaian nilai RB dan indeks kepuasan masyarakat dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

8. **Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas**
   Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Dirjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan

Manual Indikator Sasaran Program dan Kegiatan akan disusun lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Renstra PKH tahun 2020-2024.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2019 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pergerakan barang dan jasa termasuk produk peternakan. Salah satu dampak yang terlihat signifikan selama pandemi Covid-19, adanya penurunan harga karena over supplay, terutama daging ayam ras. Hal ini menyebabkan Ditjen PKH harus mengubah target indikator level 1 dan diselaraskan dengan Renstra Kementan yang direvisi pada Bulan November Tahun 2020. Indikator Kegiatan Sasaran Program (IKSP) yang berubah antara lain: a) produksi daging yang semula jumlah menjadi peningkatan produksi dengan satuan %; b) pertumbuhan volume ekspor berubah menjadi pertumbuhan nilai ekspor; c) indeks ketersediaan sarana menjadi tingkat kemanfaatan sarana.

Perubahan sasaran program dan indikator program level 1 secara rinci disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

| Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) | *Baseline* 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak** | | | | | | |
| Peningkatan Produksi daging (%) | 4480,8 ribu ton | 0,4 | 0,85 | 1,2 | 1,24 | 1,28 |
| Peningkatan Produksi susu (%) | 994,54 ribu ton | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Peningkatan Produksi telur (%) | 5.355,62 ribu ton | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| **SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan** | | | | | | |
| Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%) | US$ 744,3 ribu | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| **SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak** | | | | | | |
| Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%) | 80 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| **SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan yang sesuai kebutuhan** | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan (%) | | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 |
| **SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan** | | | | | | |
| Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 |
| **SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia** | | | | | | |
| Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus) | 122 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
| **SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima** | | | | | | |
| Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai) | 22,01 | 32,3 | 32,75 | 33,5 | 34 | 35,5 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)) | 3,4 | 3,37 | 3,44 | 3,51 | 3,55 | 3,58 |
| **SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas** | | | | | | |
| Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai) | 87,82 | 88,25 | 88,68 | 88,93 | 90,32 | 90,85 |

# BAB III
## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

# BAB III
## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (termasuk sub sektor peternakan) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1).
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2).
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4).
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelay

RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)* yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga *Project Major* diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

Prioritas Nasional (PN) kemudian diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)

Berdasarkan Gambar 3.1, Program Prioritas (PP) yang menjadi kontribusi penting Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja,dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (PP6). Ditjen PKH akan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional 1 (PN 1) dengan Program Prioritas 3 (PP3) dan Program Prioritas 6 (PP6)

PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan Program Prioritas (PP3): Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan secara nasional mempunyai indikator dan target sebagai berikut:

a. Skor Pola Pangan Harapan *:* 2020 (90,4%) dan 2024 (95,2%)
b. Angka kecukupan protein (AKP) sebesar 57 g/kapita/hari selama tahun 2020-2024.
c. Produksi daging: 2020 (4,1 juta ton) dan 2024 (4,6 juta ton)
d. Konsumsi daging: 2020 (13,5 kg/perkapita/tahun) dan 2024 (14,7 kg/perkapita/tahun)
e. Konsumsi protein asal ternak: 2020 (10,7 gram/kap/hari) dan 2024 (11,0 gram/kap/hari)
f. Ketersediaan protein hewani: 2,5 juta ton (2020) dan 2,9 juta ton (2024)

Selain itu, kontribusi Ditjen PKH terhadap PN 1 juga menyangkut meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor dan daya saing perekonomian terkait dengan PP 6, yaitu Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor riil dan industrialisasi. Indikator dan targetnya yaitu pertumbuhan PDB pertanian : 2020 (3,5%) dan 2024 (4,0-4,1%).

Kontribusi Ditjen PKH terhadap PP, KP dan Indikator RPJMN (PP Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian) disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 . Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH

| PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP) | Sasaran Program dan |
|---|---|
| **INDIKATOR RPJMN** | **Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)** |
| PP3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan | **SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak** |
| Skor Pola Pangan Harapan | 1 Peningkatan produksi daging (%): 0,4 (2020) dan 1,28 (2024) |
| Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari) | 2 Peningkatan produksi susu (%): 2,6 (2020) dan 2,9 (2024) |
| KP 1 . Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan | 3 Peningkatan produksi telur (%):2,15 (2020) dan 2,16 (2024) |
| Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun) | **SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan** |
| Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,0 gram/ kap/hari) | 4 Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%): 15 (2020) dan 30 (2024) |
| KP 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan | **SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak** |
| Produksi Daging (juta ton) | 5 Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%): 81,5 (2020) dan 83,5 (2024) |
| Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton) | **SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan** |
| KP 3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian | 6 Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan (%):85(2020) dan 95 (2024) |
| Nilai Tukar Petani | **SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan** |
| KP 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian | 7 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%): 80 (2020) dan 81 (2024) |
| Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Aksesi) | **SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia** |
| KP 5. Peningkatan tata nasionalkelola sistem pangan | 8 Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus): 122 (2020) dan 114 (2024) |
| Global food security index | **SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima** |
| | 9 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 32,3 (2020) dan 35,5 (2024) |
| | 10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)): 3,37 (2020) dan 3,58 (2024) |
| | **SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas** |
| | 11 Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 88,25 (2020) dan 90,85 (2024) |

Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian akan berperan untuk ketersediaan protein hewani, peningkatan produksi daging, keamanan pangan asal ternak, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

## 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practises.***

   *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

   **Strategi pelaksanaan** dilakukan melalui:

   a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
   b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
   c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. **Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan**

   Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage)* yang

dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.

**Strategi pelaksanaan** dilakukan melalui:

a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

**3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan hiegine dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

**Strategi pelaksanaan** dilakukan melalui:

a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

**4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan

pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

**Strategi pelaksanaan** dilakukan melalui:

a. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
   Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

   Dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Kementan maka posisi Ditjen PKH dapat dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH

| No | Arah kebijakan dan Strategi Kementan | Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH |
|---|---|---|
| 1 | **Terjaganya ketahanan pangan nasional. Strategi yaitu:**<br>1. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian;<br>2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;<br>3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; | **Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan *Good Farming Practises*. Strategi yaitu:**<br>1. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.<br>2. Penyediaan pakan yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan berbasis bahan pakan lokal.<br>3. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.<br>**Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**. **Strategi yaitu:**<br>1. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia<br>2. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner. |
| 2 | **Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Strategi yaitu:**<br>1. Peningkatan nilai tambah<br>2. Peningkatan daya saing pertanian | **Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hewan. Strategi yaitu:**<br>1. Pengolahan distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.<br>2. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan |
| 3 | **Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Strategi yaitu:**<br>1. Penguatan impelementasi manajemen ASN<br>2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis<br>3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja<br>4. Transformasi pelayanan publik | **Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi yaitu:**<br>1. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. |

Dari Tabel 3.2 nampak bahwa arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH mendukung dan sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Ada 4 arah kebijakan dengan 9 strategi Ditjen PKH sebagai landasan dalam pembangunan Tahun 2020-2024.

## 3.2. DUKUNGAN PETERNAKAN DAN KESWAN DALAM PENGARUSUTAMAAN DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL

### 3.2.1.Pengembangan Korporasi

Korporasi peternak dibangun melalui pemberdayaan peternak dengan mengkonsolidasikan peternak dalam suatu kelembagaan petani/peternak (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan ekonomi. Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani/peternak karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan

Amanah RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu Proyek Nasional *(Major Project)* untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani/peternak, kegiatan ini akan dikembangkan di 1.029 klaster komoditas pertanian (termasuk peternak) dengan jumlah korporasi petani yang dikembangkan sebanyak 350 unit dan untuk peternakan ditargetkan sebanyak 100 unit. Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Pengembangan korporasi peternak dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan diseconomic-externality yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakekatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi peternakan. Pengembangan kawasan komoditas peternakan dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang

diantaranya menetapkan kawasan komoditas prioritas peternakan di seluruh kabupaten

## 3.3. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

### 3.3.1.Kerangka Regulasi

Aspek regulasi dimaksudkan sebagai kebutuhan regulasi yang harus diadakan selama kurun waktu 2020-2024. Kebutuhan ini dapat berupa penambahan regulasi ataupun penyederhanaan dan penghapusan untuk menjalankan penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Berdasarkan definisi diatas maka perencanaan regulasi dapat mempengaruhi implementasi arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan akhir organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut ini kerangka regulasi yang diperlukan untuk Ditjen PKH sebagai berikut:

Tabel 3. 3 . Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi

| Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi dan Urgensi kerangka regulasi | | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | **Rancangan Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Permentan No. 13/2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | Arahan Presiden tentang **penyederhanaan** regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi |
| 2 | Permentan No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | |
| 3 | Permentan No. 127/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | |
| 4 | Permentan No. 51/2011 tentang Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak) | |
| **2.** | **Rancangan Permentan tentang Pengawasan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Permentan No. 74/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan | Arahan Presiden tentang **penyederhanaan regulasi.** Penyederhanaan dari beberapa regulasi |
| 2 | Permentan No. 65/2008 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan | |
| 3 | Permentan No. 42/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak | |
| 4 | Permentan No. 14/2008 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan | |
| 5 | Permentan No. 15/2008 tentang Monitoring dan Surveilans, Residu dan Cemaran Mikroba pada Hewan | |
| 6 | Permentan No. 45/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar | |
| 7 | Permentan No. 35/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif | |

| | Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi dan Urgensi kerangka regulasi | Keterangan |
|---|---|---|
| **3.** | **Rancangan Permentan tentang Standar dan Sertifikasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Kepmentan No. 240/2003 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik | Arahan Presiden tentang **penyederhanaan regulasi.** Penyederhanaan dari beberapa regulasi: |
| 2 | Kepmentan No. 446/1999 tentang Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik | |
| 3 | Permentan No. 114/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban | |
| 4 | Permentan No. 45 tahun 2007 tentang Klasifikasi Laboratorium | |
| 5 | Permentan No. 13/2010 tentang RPH Ruminansia dan Meet Cutting Plan | |
| 6 | Permentan No. 38/2015 tentang Tata Cara Produksi Kopi Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan | |
| 7 | Permentan No. 19/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih/Bibit Ternak dan SDGH | |
| 8 | Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran Pakan | |
| 9 | Kepmentan No. 695/1996 tentang Pendaftaran Obat Hewan jo. Kepmentan 455/2000 tentang Perubahan Obat Hewan | |
| **4.** | **Rancangan Permentan tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Kepmentan No. 4040/2002 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan | Arahan Presiden tentang **penyederhanaan regulasi.** Penyederhanaan dari beberapa regulasi: |
| 2 | Permentan No. 18/2009 tentang Izin Usaha Obat Hewan | |
| **5.** | **Rancangan Permentan tentang Nilai Tambah dan Daya Saing bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Penambahan substansi: pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, kemitraan hasil peternakan, dan pengembangan usaha peternakan. Merupakan pengganti dari: Permentan No. 13/2017 tentang Kemitraan Hasil Peternakan | **Penambahan substansi** |
| **6.** | **Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Penambahan substansi: penyediaan, peredaran ternak dan produk hewan; penyediaan dan peredaran obat hewan; penyediaan dan peredaran pakan; penyediaan dan peredaran susu | **Penambahan substansi** |
| 7. | **Rancangan Permentan Program Kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| 1 | Permentan Bekerja (Permentan No. 14/2019) | Arahan Presiden tentang **penyederhanaan regulasi.** Penyederhanaan dari beberapa regulasi: |
| 2 | Permentan No. 48 tahun 2016 tentang UPSUS SIWAB | |
| 3 | Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat | |

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat 7 rancangan regulasi yang akan disederhanakan maupun penambahan substansi. Ketujuh regulasi tersebut dibuat untuk menyederhanakan 27 regulasi yang ada saat ini dalam rangka bagian dari penataan peraturan perundang-undangan dan adanya arahan Presiden.

### 3.3.2.Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi.

Organisasi Ditjen PKH sesuai dengan prinsip *Structure Follow The Stractegy* memerlukan kerangka kelembagaan yang menyesuaikan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tata laksana yang baik diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Ditjen PKH tahun 2020 – 2024.

Gambar 3.2. Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH

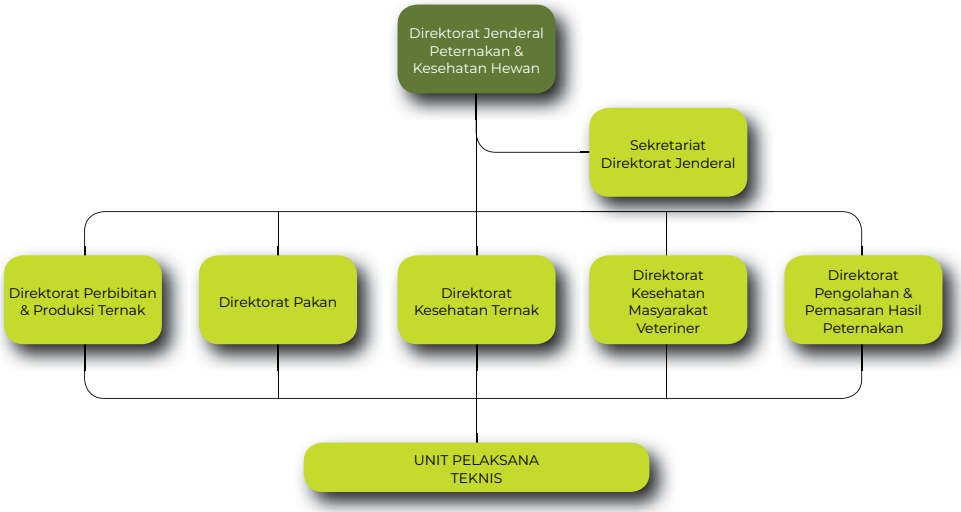

Dari Gambar 3.2 Ditjen PKH didukung oleh 6 unit kerja setingkat eselon II. Sebanyak 5 (lima) unit kerja menjalankan fungsi teknis, meliputi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; Direktorat Pakan; Direktorat Kesehatan Hewan; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Sementara fungsi manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Ditjen PKH juga dilengkapi dengan 22 UPT yang terdiri dari a) Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya; b) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan; c) Balai Besar Veteriner Wates; d) Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros; e) Balai Besar Veteriner Denpasa; f) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturaden; g) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari; h) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang; i) Balai Embrio Ternak Cipelang; j) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor; k) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP); l) BVet Medan; m) BVet Bukittinggi; n) BVet Bandar Lampung; o) BVet Subang; p) BPTUHPT Indrapuri; q) BPTUHPT Siborongborong; r) BPTUHPT Padang Mangatas; s) BPTUHPT Sembawa; t) BPTUHPT Pelaihari; u) BPTUHPT Denpasar. Untuk mendukung cakupan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Indonesia Timur, telah mendapat persetujuan untuk membentuk Loka Papua yang telah mulai dibangun pada tahun 2019.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Untuk mengikuti kebijakan tersebut maka Pejabat fungsional akan menggantikan para pejabat struktural eselon III dan eselon IV dilingkup Ditjen PKH. Penempatan pejabat fungsional tersebut disesuaikan menurut keahlian yang dibutuhkan pada masing-masing unit Eselon II.

# BAB IV
## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

# BAB IV
# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mempertimbangkan kerangka kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, serta kerangka kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah ditetapkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, disusunlah program Ditjen Peternakan dan Keswan Tahun 2020 – 2024, yaitu : "Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat", dengan sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3. Terjaminnya kemanan dan mutu pangan asal ternak 4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024, diperlukan penetapan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan, strategi program dan kegiatan prioritas telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan arah kebijakan nasional, karena penentuan target kinerja telah mempertimbangkan adanya sumber dana baik dari APBN, APBD dan berbagai sumber dana lainnya.

## 4.1. TARGET KINERJA

Terdapat 11 indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diakhir periode 2020 – 2024. Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak

ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Target kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan hasil pendelegasian indikator kinerja Kementerian Pertanian.

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, serta pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam sasaran program, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana secara tepat sasaran dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan untuk penyelengaraan kegiatan Ditjen PKH dapat berasal dari Pemerintah (APBN : RM, BLU, PNBP), dan sumber pendanaan lainnya yang berasal dari: Pemerintah Daerah (APBD), Swasta, BUMN/BUMD; investasi dalam negeri (PMDN), investasi dari luar negeri (PMA), Lembaga Keuangan dan Perbankan dan Swadaya Maysarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, proporsi APBN dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan pengungkit sumber pendanaan lainnya dalam mendukung target pembangunan nasional. Untuk sinergisme berbagai sumber pendanaan dalam kerangka pelaksanaan program sangat diperlukan. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 kerangka pendanaan tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

| No | Kegiatan | Alokasi (Milyar Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Peningkatan Produksi Pakan ternak | 77.088 | 155.507 | 194.385 | 242.985 | 303.735 |
| 2 | Pengendalian dan Penanggulang-an penyakit hewan | 171.603 | 306.266 | 362.046 | 416.352 | 478.805 |
| 3 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | 619.446 | 1.175.866 | 1.501.005 | 1.674.350 | 1.851.718 |
| 4 | Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak | 25.829 | 65.489 | 87.438 | 100.554 | 120.664 |
| 5 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 30.369 | 76.816 | 92.947 | 102.242 | 112.466 |
| 6 | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan | 375.243 | 352.915 | 433.969 | 439.759 | 445.694 |
| | **Total** | **1.299.578** | **2.132.854** | **2.671.790** | **2.976.424** | **3.313.082** |

Pada tabel 4.1 nampak bahwa dana untuk penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak memegang porsi yang cukup besar diantara kegiatan-kegiatan program lainnya di Ditjen PKH.

Alokasi pendanaan tahun 2020 sesuai dengan alokasi yangg tertuang dalam DIPA, sedangkan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bersifat perkiraan kebutuhan dan akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana yang diperoleh dan pilihan prioritas kegiatan dalam mendukun sasaran program serta evaluasi program pada tahun sebelumnya. Pendanaan ini baru bersifat untuk kegiatan-kegiatan penting penyelengaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, belum mempertimbangkan kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi selama 2020-2024 memerlukan perhitungan tersendiri karena banyak variabel yang harus dipertimbangkan.

Rencana Kerja Tahunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Lampiran 2.

# BAB V
# PENUTUP

# BAB V
## PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan keswan 5 tahun mendatang dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 terkait Sub Sektor Peternakan dan Keswan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan program sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung kinerja pembangunan peternakan dan keswan.

Diharapkan dokumen Renstra ini, menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik di pusat maupun daerah sehingga terwujud suatu sinergi kegiatan antara pusat dan daerah. Sinergi horisontal dan vertikal, baik di lingkungan Ditjen PKH, dengan Eselon I lingkup Kementan, dan Pemangku Kepentingan lainnya (Pemda, Masyarakat dan Swasta) sangat diperlukan untuk mewujudkan visi : ***"Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern.***

Penyusunan Renstra telah disusun sesuai Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan apabila diperlukan adanya perubahan Renstra Ditjen Peternakan dan Keswan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

# LAMPIRAN

**PROYEKSI POPULASI SAPI POTONG TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 416.463 | 432.163 | 449.613 | 468.977 | 490.443 |
| 2 | Sumatera Utara | 899.093 | 932.988 | 970.659 | 1.012.463 | 1.058.806 |
| 3 | Sumatera Barat | 418.375 | 434.148 | 451.677 | 471.130 | 492.695 |
| 4 | Riau | 203.301 | 210.965 | 219.484 | 228.936 | 239.415 |
| 5 | Jambi | 161.895 | 167.998 | 174.781 | 182.309 | 190.654 |
| 6 | Sumatera Selatan | 305.799 | 317.327 | 330.140 | 344.358 | 360.121 |
| 7 | Bengkulu | 165.312 | 171.544 | 178.470 | 186.157 | 194.678 |
| 8 | Lampung | 867.002 | 899.688 | 936.015 | 976.327 | 1.021.016 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 15.793 | 16.388 | 17.050 | 17.784 | 18.598 |
| 10 | Kepulauan Riau | 27.462 | 28.498 | 29.648 | 30.925 | 32.341 |
| 11 | DKI Jakarta | 2.404 | 2.494 | 2.595 | 2.707 | 2.831 |
| 12 | Jawa Barat | 390.507 | 405.229 | 421.591 | 439.748 | 459.877 |
| 13 | Jawa Tengah | 1.806.474 | 1.874.577 | 1.950.267 | 2.034.260 | 2.127.374 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 307.487 | 319.079 | 331.963 | 346.260 | 362.109 |
| 15 | Jawa Timur | 4.830.872 | 5.012.994 | 5.215.403 | 5.440.019 | 5.689.023 |
| 16 | Banten | 49.655 | 51.527 | 53.607 | 55.916 | 58.475 |
| 17 | Bali | 590.452 | 612.711 | 637.451 | 664.904 | 695.339 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.288.795 | 1.337.382 | 1.391.382 | 1.451.305 | 1.517.736 |

***lanjutan***

**PROYEKSI POPULASI SAPI POTONG TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.192.820 | 1.237.788 | 1.287.766 | 1.343.228 | 1.404.711 |
| 20 | Kalimantan Barat | 156.453 | 162.352 | 168.907 | 176.181 | 184.246 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 77.682 | 80.610 | 83.865 | 87.477 | 91.481 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 131.569 | 136.529 | 142.042 | 148.159 | 154.941 |
| 23 | Kalimantan Timur | 123.466 | 128.121 | 133.294 | 139.035 | 145.399 |
| 24 | Kalimantan Utara | 23.872 | 24.772 | 25.772 | 26.882 | 28.112 |
| 25 | Sulawesi Utara | 129.069 | 133.935 | 139.343 | 145.344 | 151.997 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 392.681 | 407.485 | 423.938 | 442.196 | 462.437 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.436.153 | 1.490.296 | 1.550.469 | 1.617.245 | 1.691.270 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 358.239 | 371.744 | 386.754 | 403.410 | 421.876 |
| 29 | Gorontalo | 254.780 | 264.385 | 275.060 | 286.906 | 300.038 |
| 30 | Sulawesi Barat | 113.026 | 117.287 | 122.022 | 127.278 | 133.103 |
| 31 | Maluku | 110.418 | 114.581 | 119.207 | 124.341 | 130.033 |
| 32 | Maluku Utara | 107.286 | 111.331 | 115.826 | 120.814 | 126.344 |
| 33 | Papua Barat | 56.549 | 58.681 | 61.050 | 63.679 | 66.594 |
| 34 | Papua | 111.964 | 116.185 | 120.876 | 126.082 | 131.853 |
| | **NASIONAL** | **17.523.168** | **18.183.783** | **18.917.988** | **19.732.745** | **20.635.965** |

**PROYEKSI POPULASI SAPI PERAH TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | Sumatera Utara | 5.755 | 5.880 | 6.022 | 6.182 | 6.360 |
| 3 | Sumatera Barat | 705 | 720 | 738 | 757 | 779 |
| 4 | Riau | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 |
| 5 | Jambi | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 6 | Sumatera Selatan | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 7 | Bengkulu | 335 | 342 | 350 | 359 | 370 |
| 8 | Lampung | 1.034 | 1.057 | 1.082 | 1.111 | 1.143 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 184 | 188 | 192 | 197 | 203 |
| 10 | Kepulauan Riau | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | DKI Jakarta | 2.053 | 2.097 | 2.148 | 2.205 | 2.268 |
| 12 | Jawa Barat | 119.884 | 122.492 | 125.446 | 128.767 | 132.481 |
| 13 | Jawa Tengah | 141.579 | 144.659 | 148.148 | 152.070 | 156.456 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 3.587 | 3.665 | 3.753 | 3.853 | 3.964 |
| 15 | Jawa Timur | 299.315 | 305.826 | 313.201 | 321.493 | 330.767 |
| 16 | Banten | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 |
| 17 | Bali | - | - | - | - | - |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - |

***lanjutan***

**PROYEKSI POPULASI SAPI PERAH TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 20 | Kalimantan Barat | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 21 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - |
| 22 | Kalimantan Selatan | 198 | 202 | 207 | 212 | 219 |
| 23 | Kalimantan Timur | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 |
| 24 | Kalimantan Utara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.081 | 1.105 | 1.131 | 1.161 | 1.195 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 29 | Gorontalo | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 30 | Sulawesi Barat | - | - | - | - | - |
| 31 | Maluku | - | - | - | - | - |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| | **NASIONAL** | **576.301** | **588.838** | **603.038** | **619.004** | **636.859** |

**PROYEKSI POPULASI KERBAU TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 86.644 | 87.572 | 88.719 | 90.091 | 91.700 |
| 2 | Sumatera Utara | 101.156 | 102.240 | 103.578 | 105.181 | 107.059 |
| 3 | Sumatera Barat | 82.958 | 83.846 | 84.944 | 86.258 | 87.799 |
| 4 | Riau | 26.731 | 27.017 | 27.371 | 27.794 | 28.291 |
| 5 | Jambi | 44.149 | 44.622 | 45.206 | 45.906 | 46.725 |
| 6 | Sumatera Selatan | 28.829 | 29.138 | 29.519 | 29.976 | 30.511 |
| 7 | Bengkulu | 30.755 | 31.085 | 31.492 | 31.979 | 32.550 |
| 8 | Lampung | 18.250 | 18.446 | 18.688 | 18.977 | 19.316 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 351 | 355 | 360 | 365 | 372 |
| 10 | Kepulauan Riau | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | DKI Jakarta | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 12 | Jawa Barat | 83.397 | 84.291 | 85.394 | 86.715 | 88.264 |
| 13 | Jawa Tengah | 59.324 | 59.960 | 60.745 | 61.685 | 62.787 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 497 | 502 | 509 | 516 | 526 |
| 15 | Jawa Timur | 23.345 | 23.595 | 23.904 | 24.274 | 24.708 |
| 16 | Banten | 57.230 | 57.843 | 58.600 | 59.507 | 60.570 |
| 17 | Bali | 1.333 | 1.347 | 1.365 | 1.386 | 1.411 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 121.900 | 123.206 | 124.819 | 126.751 | 129.014 |

*lanjutan*

**PROYEKSI POPULASI KERBAU TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 184.282 | 186.257 | 188.695 | 191.615 | 195.037 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2.022 | 2.043 | 2.070 | 2.102 | 2.140 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 11.620 | 11.745 | 11.898 | 12.083 | 12.298 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 24.173 | 24.432 | 24.751 | 25.134 | 25.583 |
| 23 | Kalimantan Timur | 6.068 | 6.133 | 6.213 | 6.309 | 6.422 |
| 24 | Kalimantan Utara | 3.683 | 3.723 | 3.771 | 3.830 | 3.898 |
| 25 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2.822 | 2.852 | 2.889 | 2.934 | 2.987 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 114.650 | 115.878 | 117.395 | 119.212 | 121.341 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 2.303 | 2.328 | 2.358 | 2.395 | 2.437 |
| 29 | Gorontalo | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 30 | Sulawesi Barat | 8.621 | 8.713 | 8.827 | 8.964 | 9.124 |
| 31 | Maluku | 15.456 | 15.621 | 15.826 | 16.071 | 16.358 |
| 32 | Maluku Utara | 602 | 609 | 617 | 626 | 638 |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | 757 | 765 | 775 | 787 | 801 |
| | **NASIONAL** | **1.144.019** | **1.156.277** | **1.171.414** | **1.189.539** | **1.210.785** |

**PROYEKSI POPULASI KAMBING TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 613.864 | 616.423 | 618.994 | 621.575 | 624.167 |
| 2 | Sumatera Utara | 841.021 | 844.528 | 848.049 | 851.586 | 855.137 |
| 3 | Sumatera Barat | 248.078 | 249.112 | 250.151 | 251.194 | 252.241 |
| 4 | Riau | 235.352 | 236.334 | 237.319 | 238.309 | 239.303 |
| 5 | Jambi | 386.226 | 387.836 | 389.453 | 391.077 | 392.708 |
| 6 | Sumatera Selatan | 403.652 | 405.335 | 407.025 | 408.722 | 410.427 |
| 7 | Bengkulu | 202.784 | 203.629 | 204.478 | 205.331 | 206.187 |
| 8 | Lampung | 1.437.230 | 1.443.223 | 1.449.241 | 1.455.284 | 1.461.353 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 8.885 | 8.922 | 8.960 | 8.997 | 9.035 |
| 10 | Kepulauan Riau | 21.934 | 22.025 | 22.117 | 22.209 | 22.302 |
| 11 | DKI Jakarta | 5.287 | 5.309 | 5.332 | 5.354 | 5.376 |
| 12 | Jawa Barat | 1.314.362 | 1.319.842 | 1.325.346 | 1.330.872 | 1.336.422 |
| 13 | Jawa Tengah | 3.942.393 | 3.958.832 | 3.975.340 | 3.991.916 | 4.008.562 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 394.768 | 396.414 | 398.067 | 399.727 | 401.394 |
| 15 | Jawa Timur | 3.518.655 | 3.533.327 | 3.548.060 | 3.562.855 | 3.577.712 |
| 16 | Banten | 711.042 | 714.007 | 716.984 | 719.974 | 722.976 |
| 17 | Bali | 47.797 | 47.996 | 48.196 | 48.397 | 48.599 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 697.811 | 700.721 | 703.642 | 706.576 | 709.523 |

***lanjutan***

**PROYEKSI POPULASI KAMBING TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 970.608 | 974.655 | 978.719 | 982.800 | 986.898 |
| 20 | Kalimantan Barat | 145.749 | 146.357 | 146.967 | 147.580 | 148.195 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 45.511 | 45.700 | 45.891 | 46.082 | 46.274 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 74.698 | 75.009 | 75.322 | 75.636 | 75.951 |
| 23 | Kalimantan Timur | 67.892 | 68.175 | 68.459 | 68.745 | 69.031 |
| 24 | Kalimantan Utara | 13.588 | 13.645 | 13.702 | 13.759 | 13.816 |
| 25 | Sulawesi Utara | 54.261 | 54.487 | 54.714 | 54.943 | 55.172 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 542.231 | 544.492 | 546.762 | 549.042 | 551.332 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 777.593 | 780.835 | 784.091 | 787.361 | 790.644 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 189.878 | 190.670 | 191.465 | 192.263 | 193.065 |
| 29 | Gorontalo | 100.754 | 101.174 | 101.596 | 102.020 | 102.445 |
| 30 | Sulawesi Barat | 195.204 | 196.018 | 196.835 | 197.656 | 198.480 |
| 31 | Maluku | 100.636 | 101.055 | 101.477 | 101.900 | 102.325 |
| 32 | Maluku Utara | 143.605 | 144.204 | 144.805 | 145.409 | 146.016 |
| 33 | Papua Barat | 17.986 | 18.061 | 18.137 | 18.212 | 18.288 |
| 34 | Papua | 68.769 | 69.055 | 69.343 | 69.633 | 69.923 |
| | **NASIONAL** | **18.540.103** | **18.617.411** | **18.695.042** | **18.772.997** | **18.851.277** |

**PROYEKSI POPULASI DOMBA TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 101.053 | 103.268 | 105.532 | 107.845 | 110.209 |
| 2 | Sumatera Utara | 756.601 | 773.186 | 790.134 | 807.454 | 825.154 |
| 3 | Sumatera Barat | 5.678 | 5.802 | 5.930 | 6.060 | 6.192 |
| 4 | Riau | 29.759 | 30.411 | 31.078 | 31.759 | 32.455 |
| 5 | Jambi | 81.121 | 82.899 | 84.716 | 86.573 | 88.471 |
| 6 | Sumatera Selatan | 36.638 | 37.441 | 38.262 | 39.100 | 39.957 |
| 7 | Bengkulu | 9.505 | 9.713 | 9.926 | 10.143 | 10.366 |
| 8 | Lampung | 82.317 | 84.121 | 85.965 | 87.849 | 89.775 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| 10 | Kepulauan Riau | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | DKI Jakarta | 1.510 | 1.543 | 1.577 | 1.611 | 1.647 |
| 12 | Jawa Barat | 12.587.078 | 12.862.990 | 13.144.949 | 13.433.090 | 13.727.546 |
| 13 | Jawa Tengah | 2.468.643 | 2.522.757 | 2.578.056 | 2.634.568 | 2.692.318 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 150.428 | 153.726 | 157.095 | 160.539 | 164.058 |
| 15 | Jawa Timur | 1.453.298 | 1.485.154 | 1.517.709 | 1.550.978 | 1.584.975 |
| 16 | Banten | 331.086 | 338.344 | 345.760 | 353.339 | 361.085 |
| 17 | Bali | - | - | - | - | - |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 23.729 | 24.249 | 24.781 | 25.324 | 25.879 |

*lanjutan*

**PROYEKSI POPULASI DOMBA TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 78.494 | 80.215 | 81.973 | 83.770 | 85.606 |
| 20 | Kalimantan Barat | 161 | 165 | 168 | 172 | 176 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 554 | 566 | 578 | 591 | 604 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.762 | 1.801 | 1.840 | 1.880 | 1.922 |
| 23 | Kalimantan Timur | 611 | 625 | 638 | 652 | 667 |
| 24 | Kalimantan Utara | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 25 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - |
| 26 | Sulawesi Tengah | 11.857 | 12.117 | 12.383 | 12.654 | 12.932 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 865 | 884 | 903 | 923 | 943 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - |
| 29 | Gorontalo | - | - | - | - | - |
| 30 | Sulawesi Barat | - | - | - | - | - |
| 31 | Maluku | 11.573 | 11.827 | 12.086 | 12.351 | 12.622 |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | 160 | 164 | 167 | 171 | 174 |
| | **NASIONAL** | **18.224.651** | **18.624.140** | **19.032.385** | **19.449.580** | **19.875.919** |

**PROYEKSI POPULASI BABI TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 2.479 | 2.555 | 2.633 | 2.713 | 2.796 |
| 2 | Sumatera Utara | 980.301 | 1.010.185 | 1.040.980 | 1.072.714 | 1.105.416 |
| 3 | Sumatera Barat | 24.751 | 25.505 | 26.283 | 27.084 | 27.910 |
| 4 | Riau | 50.509 | 52.048 | 53.635 | 55.270 | 56.955 |
| 5 | Jambi | 1.246 | 1.284 | 1.323 | 1.363 | 1.405 |
| 6 | Sumatera Selatan | 15.134 | 15.595 | 16.070 | 16.560 | 17.065 |
| 7 | Bengkulu | 1.505 | 1.551 | 1.599 | 1.647 | 1.698 |
| 8 | Lampung | 45.149 | 46.525 | 47.944 | 49.405 | 50.911 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 20.251 | 20.868 | 21.505 | 22.160 | 22.836 |
| 10 | Kepulauan Riau | 276.707 | 285.142 | 293.835 | 302.792 | 312.023 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 7.474 | 7.702 | 7.936 | 8.178 | 8.428 |
| 13 | Jawa Tengah | 128.214 | 132.123 | 136.151 | 140.301 | 144.578 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 13.806 | 14.227 | 14.661 | 15.108 | 15.568 |
| 15 | Jawa Timur | 57.052 | 58.791 | 60.583 | 62.430 | 64.334 |
| 16 | Banten | 6.510 | 6.708 | 6.913 | 7.123 | 7.340 |
| 17 | Bali | 688.417 | 709.404 | 731.030 | 753.315 | 776.280 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 64.164 | 66.120 | 68.135 | 70.213 | 72.353 |

***lanjutan***

**PROYEKSI POPULASI BABI TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2.608.908 | 2.688.440 | 2.770.396 | 2.854.851 | 2.941.881 |
| 20 | Kalimantan Barat | 455.195 | 469.071 | 483.371 | 498.106 | 513.291 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 224.950 | 231.808 | 238.875 | 246.157 | 253.661 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 5.137 | 5.293 | 5.455 | 5.621 | 5.792 |
| 23 | Kalimantan Timur | 82.311 | 84.820 | 87.406 | 90.071 | 92.816 |
| 24 | Kalimantan Utara | 28.453 | 29.320 | 30.214 | 31.135 | 32.084 |
| 25 | Sulawesi Utara | 389.015 | 400.874 | 413.095 | 425.688 | 438.665 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 258.920 | 266.813 | 274.947 | 283.328 | 291.965 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 849.715 | 875.619 | 902.312 | 929.819 | 958.164 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 96.617 | 99.562 | 102.597 | 105.725 | 108.948 |
| 29 | Gorontalo | 10.658 | 10.983 | 11.318 | 11.663 | 12.018 |
| 30 | Sulawesi Barat | 165.206 | 170.242 | 175.432 | 180.780 | 186.291 |
| 31 | Maluku | 81.602 | 84.090 | 86.654 | 89.295 | 92.017 |
| 32 | Maluku Utara | 90.492 | 93.250 | 96.093 | 99.022 | 102.041 |
| 33 | Papua Barat | 86.770 | 89.415 | 92.141 | 94.950 | 97.845 |
| 34 | Papua | 963.088 | 992.448 | 1.022.703 | 1.053.879 | 1.086.007 |
| | **NASIONAL** | **8.780.706** | **9.048.385** | **9.324.223** | **9.608.470** | **9.901.382** |

**PROYEKSI POPULASI AYAM BURAS TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 4.704.735 | 4.824.712 | 4.947.749 | 5.073.923 | 5.203.314 |
| 2 | Sumatera Utara | 15.020.721 | 15.403.769 | 15.796.585 | 16.199.418 | 16.612.525 |
| 3 | Sumatera Barat | 4.346.792 | 4.457.641 | 4.571.316 | 4.687.891 | 4.807.438 |
| 4 | Riau | 7.057.980 | 7.237.967 | 7.422.545 | 7.611.829 | 7.805.941 |
| 5 | Jambi | 11.238.177 | 11.524.765 | 11.818.662 | 12.120.053 | 12.429.130 |
| 6 | Sumatera Selatan | 10.557.768 | 10.827.005 | 11.103.108 | 11.386.251 | 11.676.616 |
| 7 | Bengkulu | 4.240.579 | 4.348.719 | 4.459.617 | 4.573.343 | 4.689.969 |
| 8 | Lampung | 13.680.556 | 14.029.428 | 14.387.196 | 14.754.089 | 15.130.337 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.155.562 | 1.185.030 | 1.215.250 | 1.246.240 | 1.278.021 |
| 10 | Kepulauan Riau | 987.379 | 1.012.558 | 1.038.380 | 1.064.860 | 1.092.015 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 27.092.241 | 27.783.128 | 28.491.635 | 29.218.209 | 29.963.311 |
| 13 | Jawa Tengah | 42.890.066 | 43.983.819 | 45.105.464 | 46.255.712 | 47.435.293 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 3.673.476 | 3.767.155 | 3.863.222 | 3.961.739 | 4.062.769 |
| 15 | Jawa Timur | 40.501.034 | 41.533.863 | 42.593.031 | 43.679.209 | 44.793.086 |
| 16 | Banten | 8.472.009 | 8.688.057 | 8.909.613 | 9.136.820 | 9.369.821 |
| 17 | Bali | 2.948.041 | 3.023.220 | 3.100.316 | 3.179.379 | 3.260.457 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 64.164 | 66.120 | 68.135 | 70.213 | 72.353 |

*lanjutan*

**PROYEKSI POPULASI AYAM BURAS TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 12.211.633 | 12.523.046 | 12.842.400 | 13.169.898 | 13.505.747 |
| 20 | Kalimantan Barat | 5.867.007 | 6.016.623 | 6.170.055 | 6.327.400 | 6.488.756 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2.945.394 | 3.020.506 | 3.097.532 | 3.176.523 | 3.257.529 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 10.607.458 | 10.877.962 | 11.155.365 | 11.439.841 | 11.731.572 |
| 23 | Kalimantan Timur | 4.605.616 | 4.723.066 | 4.843.510 | 4.967.026 | 5.093.691 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1.189.344 | 1.219.674 | 1.250.778 | 1.282.674 | 1.315.384 |
| 25 | Sulawesi Utara | 2.579.379 | 2.645.157 | 2.712.612 | 2.781.787 | 2.852.726 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 4.968.100 | 5.094.793 | 5.224.717 | 5.357.954 | 5.494.589 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 31.038.050 | 31.829.561 | 32.641.257 | 33.473.651 | 34.327.273 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 11.179.368 | 11.464.456 | 11.756.815 | 12.056.629 | 12.364.089 |
| 29 | Gorontalo | 2.300.583 | 2.359.251 | 2.419.414 | 2.481.113 | 2.544.384 |
| 30 | Sulawesi Barat | 5.463.355 | 5.602.678 | 5.745.553 | 5.892.072 | 6.042.328 |
| 31 | Maluku | 2.485.707 | 2.549.096 | 2.614.101 | 2.680.764 | 2.749.127 |
| 32 | Maluku Utara | 750.318 | 769.452 | 789.074 | 809.196 | 829.832 |
| 33 | Papua Barat | 1.501.487 | 1.539.777 | 1.579.043 | 1.619.311 | 1.660.605 |
| 34 | Papua | 2.577.261 | 2.642.984 | 2.710.384 | 2.779.502 | 2.850.383 |
| | **NASIONAL** | **309.456.696** | **317.348.246** | **325.441.042** | **333.740.214** | **342.251.026** |

**PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 697.108 | 710.890 | 724.944 | 739.276 | 753.891 |
| 2 | Sumatera Utara | 29.013.785 | 29.587.375 | 30.172.305 | 30.768.798 | 31.377.084 |
| 3 | Sumatera Barat | 16.087.641 | 16.405.686 | 16.730.020 | 17.060.765 | 17.398.049 |
| 4 | Riau | 692.123 | 705.806 | 719.759 | 733.989 | 748.499 |
| 5 | Jambi | 1.285.389 | 1.310.800 | 1.336.714 | 1.363.141 | 1.390.089 |
| 6 | Sumatera Selatan | 7.745.964 | 7.899.099 | 8.055.261 | 8.214.510 | 8.376.907 |
| 7 | Bengkulu | 613.852 | 625.988 | 638.363 | 650.983 | 663.853 |
| 8 | Lampung | 7.407.247 | 7.553.685 | 7.703.018 | 7.855.303 | 8.010.599 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 599.023 | 610.865 | 622.942 | 635.257 | 647.816 |
| 10 | Kepulauan Riau | 791.950 | 807.607 | 823.573 | 839.854 | 856.458 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 26.547.440 | 27.072.272 | 27.607.479 | 28.153.267 | 28.709.845 |
| 13 | Jawa Tengah | 28.289.042 | 28.848.304 | 29.418.623 | 30.000.216 | 30.593.308 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 3.558.287 | 3.628.633 | 3.700.369 | 3.773.524 | 3.848.125 |
| 15 | Jawa Timur | 92.431.396 | 94.258.725 | 96.122.180 | 98.022.474 | 99.960.337 |
| 16 | Banten | 11.571.721 | 11.800.489 | 12.033.780 | 12.271.683 | 12.514.289 |
| 17 | Bali | 10.548.866 | 10.757.412 | 10.970.082 | 11.186.955 | 11.408.117 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.922.051 | 1.960.049 | 1.998.798 | 2.038.314 | 2.078.610 |

*lanjutan*

**PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 520.165 | 530.448 | 540.935 | 551.629 | 562.534 |
| 20 | Kalimantan Barat | 6.534.063 | 6.663.239 | 6.794.968 | 6.929.302 | 7.066.291 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 418.463 | 426.736 | 435.172 | 443.776 | 452.549 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 4.913.284 | 5.010.417 | 5.109.471 | 5.210.483 | 5.313.492 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.888.063 | 1.925.389 | 1.963.453 | 2.002.270 | 2.041.854 |
| 24 | Kalimantan Utara | 34.371 | 35.050 | 35.743 | 36.450 | 37.171 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.505.399 | 1.535.160 | 1.565.510 | 1.596.459 | 1.628.021 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 783.320 | 798.806 | 814.598 | 830.702 | 847.125 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 10.830.619 | 11.044.736 | 11.263.086 | 11.485.752 | 11.712.821 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 160.331 | 163.501 | 166.733 | 170.030 | 173.391 |
| 29 | Gorontalo | 216.239 | 220.514 | 224.874 | 229.319 | 233.853 |
| 30 | Sulawesi Barat | 330.984 | 337.527 | 344.200 | 351.005 | 357.944 |
| 31 | Maluku | 35.058 | 35.751 | 36.458 | 37.179 | 37.914 |
| 32 | Maluku Utara | 5.005 | 5.104 | 5.205 | 5.308 | 5.413 |
| 33 | Papua Barat | 465.735 | 474.943 | 484.332 | 493.907 | 503.671 |
| 34 | Papua | 691.565 | 705.237 | 719.179 | 733.397 | 747.896 |
| | **NASIONAL** | **269.135.550** | **274.456.245** | **279.882.128** | **285.415.278** | **291.057.816** |

**PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 33.328.203 | 33.469.847 | 33.754.341 | 34.041.253 | 34.330.604 |
| 2 | Sumatera Utara | 137.486.712 | 138.071.031 | 139.244.635 | 140.428.214 | 141.621.854 |
| 3 | Sumatera Barat | 57.893.566 | 58.139.614 | 58.633.800 | 59.132.188 | 59.634.811 |
| 4 | Riau | 96.875.647 | 97.287.369 | 98.114.311 | 98.948.283 | 99.789.343 |
| 5 | Jambi | 36.469.541 | 36.624.537 | 36.935.845 | 37.249.800 | 37.566.423 |
| 6 | Sumatera Selatan | 86.931.740 | 87.301.199 | 88.043.260 | 88.791.627 | 89.546.356 |
| 7 | Bengkulu | 8.607.301 | 8.643.882 | 8.717.355 | 8.791.453 | 8.866.180 |
| 8 | Lampung | 90.487.552 | 90.872.125 | 91.644.538 | 92.423.516 | 93.209.116 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19.906.757 | 19.991.361 | 20.161.287 | 20.332.658 | 20.505.486 |
| 10 | Kepulauan Riau | 23.849.257 | 23.950.616 | 24.154.197 | 24.359.507 | 24.566.563 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 811.146.443 | 814.593.815 | 821.517.863 | 828.500.764 | 835.543.021 |
| 13 | Jawa Tengah | 617.968.231 | 620.594.596 | 625.869.650 | 631.189.542 | 636.554.653 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 51.245.533 | 51.463.327 | 51.900.765 | 52.341.921 | 52.786.828 |
| 15 | Jawa Timur | 459.570.078 | 461.523.251 | 465.446.199 | 469.402.491 | 473.392.412 |
| 16 | Banten | 200.741.443 | 201.594.594 | 203.308.148 | 205.036.267 | 206.779.075 |
| 17 | Bali | 77.479.777 | 77.809.066 | 78.470.443 | 79.137.442 | 79.810.110 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 30.717.312 | 30.847.860 | 31.110.067 | 31.374.503 | 31.641.186 |

***lanjutan***

**PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 18.870.166 | 18.950.364 | 19.111.442 | 19.273.890 | 19.437.718 |
| 20 | Kalimantan Barat | 53.568.878 | 53.796.545 | 54.253.816 | 54.714.973 | 55.180.051 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 21.968.804 | 22.062.171 | 22.249.699 | 22.438.822 | 22.629.552 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 78.105.752 | 78.437.701 | 79.104.422 | 79.776.809 | 80.454.912 |
| 23 | Kalimantan Timur | 42.404.256 | 42.584.474 | 42.946.442 | 43.311.487 | 43.679.634 |
| 24 | Kalimantan Utara | 4.681.629 | 4.701.526 | 4.741.489 | 4.781.792 | 4.822.437 |
| 25 | Sulawesi Utara | 9.811.979 | 9.853.680 | 9.937.436 | 10.021.904 | 10.107.091 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 5.520.201 | 5.543.662 | 5.590.783 | 5.638.305 | 5.686.230 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 76.337.385 | 76.661.819 | 77.313.445 | 77.970.609 | 78.633.359 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.794.969 | 3.811.097 | 3.843.492 | 3.876.161 | 3.909.109 |
| 29 | Gorontalo | 3.399.518 | 3.413.966 | 3.442.985 | 3.472.250 | 3.501.765 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2.401.068 | 2.411.272 | 2.431.768 | 2.452.438 | 2.473.284 |
| 31 | Maluku | 676.803 | 679.680 | 685.457 | 691.283 | 697.159 |
| 32 | Maluku Utara | 126.469 | 127.007 | 128.086 | 129.175 | 130.273 |
| 33 | Papua Barat | 1.001.002 | 1.005.256 | 1.013.801 | 1.022.418 | 1.031.109 |
| 34 | Papua | 6.431.156 | 6.458.489 | 6.513.386 | 6.568.750 | 6.624.584 |
| | **NASIONAL** | **3.169.805.127** | **3.183.276.799** | **3.210.334.652** | **3.237.622.496** | **3.265.142.287** |

**PROYEKSI POPULASI ITIK TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 2.077.821 | 2.136.054 | 2.195.919 | 2.257.461 | 2.320.728 |
| 2 | Sumatera Utara | 2.492.845 | 2.562.709 | 2.634.531 | 2.708.366 | 2.784.271 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.190.976 | 1.224.354 | 1.258.668 | 1.293.943 | 1.330.207 |
| 4 | Riau | 235.075 | 241.664 | 248.436 | 255.399 | 262.557 |
| 5 | Jambi | 900.585 | 925.824 | 951.771 | 978.445 | 1.005.867 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2.096.683 | 2.155.444 | 2.215.852 | 2.277.953 | 2.341.795 |
| 7 | Bengkulu | 170.016 | 174.781 | 179.680 | 184.715 | 189.892 |
| 8 | Lampung | 924.154 | 950.054 | 976.680 | 1.004.053 | 1.032.192 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 101.837 | 104.691 | 107.626 | 110.642 | 113.743 |
| 10 | Kepulauan Riau | 37.131 | 38.172 | 39.242 | 40.341 | 41.472 |
| 11 | DKI Jakarta | 8.789 | 9.035 | 9.288 | 9.548 | 9.816 |
| 12 | Jawa Barat | 8.408.572 | 8.644.230 | 8.886.491 | 9.135.542 | 9.391.573 |
| 13 | Jawa Tengah | 5.491.420 | 5.645.322 | 5.803.536 | 5.966.185 | 6.133.392 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 418.082 | 429.799 | 441.845 | 454.228 | 466.958 |
| 15 | Jawa Timur | 6.474.032 | 6.655.473 | 6.841.998 | 7.033.750 | 7.230.877 |
| 16 | Banten | 1.973.247 | 2.028.549 | 2.085.401 | 2.143.846 | 2.203.929 |
| 17 | Bali | 551.369 | 566.822 | 582.707 | 599.038 | 615.827 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.211.446 | 1.245.398 | 1.280.301 | 1.316.183 | 1.353.070 |

***lanjutan***

**PROYEKSI POPULASI ITIK TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 255.864 | 263.035 | 270.406 | 277.985 | 285.775 |
| 20 | Kalimantan Barat | 574.725 | 590.832 | 607.391 | 624.413 | 641.913 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 292.223 | 300.413 | 308.833 | 317.488 | 326.386 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 4.861.728 | 4.997.982 | 5.138.054 | 5.282.052 | 5.430.086 |
| 23 | Kalimantan Timur | 270.361 | 277.938 | 285.727 | 293.735 | 301.967 |
| 24 | Kalimantan Utara | 25.837 | 26.561 | 27.306 | 28.071 | 28.858 |
| 25 | Sulawesi Utara | 166.267 | 170.926 | 175.717 | 180.641 | 185.704 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.351.158 | 1.389.025 | 1.427.953 | 1.467.973 | 1.509.114 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 5.074.435 | 5.216.650 | 5.362.851 | 5.513.149 | 5.667.660 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 582.533 | 598.859 | 615.643 | 632.896 | 650.634 |
| 29 | Gorontalo | 67.523 | 69.415 | 71.361 | 73.361 | 75.417 |
| 30 | Sulawesi Barat | 338.262 | 347.742 | 357.487 | 367.506 | 377.806 |
| 31 | Maluku | 233.825 | 240.378 | 247.115 | 254.040 | 261.160 |
| 32 | Maluku Utara | 78.939 | 81.151 | 83.426 | 85.764 | 88.168 |
| 33 | Papua Barat | 92.712 | 95.310 | 97.982 | 100.728 | 103.551 |
| 34 | Papua | 91.765 | 94.337 | 96.980 | 99.698 | 102.492 |
| | **NASIONAL** | **49.122.238** | **50.498.929** | **51.914.203** | **53.369.141** | **54.864.855** |

**PROYEKSI DAGING SAPI POTONG *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 8.051 | 8.401 | 8.778 | 9.196 | 9.658 |
| 2 | Sumatera Utara | 10.922 | 11.396 | 11.908 | 12.474 | 13.102 |
| 3 | Sumatera Barat | 16.508 | 17.225 | 17.998 | 18.855 | 19.803 |
| 4 | Riau | 6.455 | 6.735 | 7.038 | 7.373 | 7.743 |
| 5 | Jambi | 3.819 | 3.985 | 4.163 | 4.362 | 4.581 |
| 6 | Sumatera Selatan | 8.707 | 9.085 | 9.493 | 9.945 | 10.445 |
| 7 | Bengkulu | 2.361 | 2.463 | 2.574 | 2.696 | 2.832 |
| 8 | Lampung | 10.136 | 10.577 | 11.051 | 11.577 | 12.160 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 2.260 | 2.358 | 2.464 | 2.582 | 2.712 |
| 10 | Kepulauan Riau | 1.050 | 1.096 | 1.145 | 1.199 | 1.260 |
| 11 | DKI Jakarta | 14.388 | 15.013 | 15.687 | 16.434 | 17.261 |
| 12 | Jawa Barat | 62.178 | 64.879 | 67.792 | 71.018 | 74.591 |
| 13 | Jawa Tengah | 48.091 | 50.180 | 52.432 | 54.928 | 57.691 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 5.501 | 5.740 | 5.997 | 6.283 | 6.599 |
| 15 | Jawa Timur | 79.364 | 82.812 | 86.529 | 90.647 | 95.208 |
| 16 | Banten | 31.030 | 32.377 | 33.831 | 35.441 | 37.224 |
| 17 | Bali | 6.808 | 7.103 | 7.422 | 7.775 | 8.166 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 8.217 | 8.574 | 8.959 | 9.385 | 9.857 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING SAPI POTONG *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 9.832 | 10.259 | 10.720 | 11.230 | 11.795 |
| 20 | Kalimantan Barat | 4.051 | 4.227 | 4.417 | 4.627 | 4.860 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2.887 | 3.012 | 3.148 | 3.297 | 3.463 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 4.841 | 5.051 | 5.278 | 5.529 | 5.807 |
| 23 | Kalimantan Timur | 5.614 | 5.858 | 6.121 | 6.412 | 6.735 |
| 24 | Kalimantan Utara | 443 | 462 | 483 | 506 | 531 |
| 25 | Sulawesi Utara | 2.612 | 2.725 | 2.848 | 2.983 | 3.133 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 3.756 | 3.919 | 4.095 | 4.290 | 4.506 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 13.631 | 14.223 | 14.862 | 15.569 | 16.352 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.302 | 3.446 | 3.600 | 3.772 | 3.961 |
| 29 | Gorontalo | 1.443 | 1.505 | 1.573 | 1.648 | 1.731 |
| 30 | Sulawesi Barat | 1.630 | 1.701 | 1.777 | 1.862 | 1.956 |
| 31 | Maluku | 1.644 | 1.715 | 1.792 | 1.878 | 1.972 |
| 32 | Maluku Utara | 645 | 673 | 703 | 736 | 773 |
| 33 | Papua Barat | 1.476 | 1.541 | 1.610 | 1.686 | 1.771 |
| 34 | Papua | 2.869 | 2.993 | 3.128 | 3.276 | 3.441 |
| | **NASIONAL** | **386.519** | **403.309** | **421.414** | **441.471** | **463.680** |

**PROYEKSI DAGING KERBAU *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 2.320 | 2.364 | 2.413 | 2.469 | 2.533 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.591 | 1.621 | 1.655 | 1.693 | 1.737 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.971 | 2.009 | 2.051 | 2.098 | 2.152 |
| 4 | Riau | 1.542 | 1.572 | 1.604 | 1.642 | 1.684 |
| 5 | Jambi | 1.640 | 1.671 | 1.706 | 1.745 | 1.790 |
| 6 | Sumatera Selatan | 617 | 629 | 642 | 657 | 674 |
| 7 | Bengkulu | 261 | 266 | 272 | 278 | 285 |
| 8 | Lampung | 98 | 100 | 102 | 105 | 107 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kepulauan Riau | - | - | - | - | - |
| 11 | DKI Jakarta | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| 12 | Jawa Barat | 1.389 | 1.415 | 1.445 | 1.478 | 1.516 |
| 13 | Jawa Tengah | 1.533 | 1.562 | 1.595 | 1.632 | 1.674 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 |
| 16 | Banten | 2.703 | 2.754 | 2.812 | 2.877 | 2.951 |
| 17 | Bali | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.061 | 1.081 | 1.104 | 1.129 | 1.158 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING KERBAU *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.572 | 1.602 | 1.635 | 1.673 | 1.716 |
| 20 | Kalimantan Barat | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 523 | 533 | 544 | 557 | 571 |
| 23 | Kalimantan Timur | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| 24 | Kalimantan Utara | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 25 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - |
| 26 | Sulawesi Tengah | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2.841 | 2.895 | 2.955 | 3.024 | 3.101 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 29 | Gorontalo | - | - | - | - | - |
| 30 | Sulawesi Barat | 150 | 153 | 156 | 160 | 164 |
| 31 | Maluku | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| | **NASIONAL** | **22.246** | **22.671** | **23.143** | **23.680** | **24.287** |

**PROYEKSI DAGING KAMBING *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 1.628 | 1.645 | 1.663 | 1.680 | 1.698 |
| 2 | Sumatera Utara | 849 | 858 | 867 | 877 | 886 |
| 3 | Sumatera Barat | 524 | 530 | 535 | 541 | 547 |
| 4 | Riau | 505 | 510 | 515 | 521 | 526 |
| 5 | Jambi | 816 | 825 | 834 | 843 | 852 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.214 | 1.227 | 1.240 | 1.253 | 1.266 |
| 7 | Bengkulu | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| 8 | Lampung | 1.374 | 1.389 | 1.403 | 1.418 | 1.433 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| 10 | Kepulauan Riau | 338 | 341 | 345 | 348 | 352 |
| 11 | DKI Jakarta | 602 | 608 | 615 | 621 | 628 |
| 12 | Jawa Barat | 3.186 | 3.220 | 3.254 | 3.289 | 3.324 |
| 13 | Jawa Tengah | 8.712 | 8.804 | 8.898 | 8.992 | 9.087 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 1.266 | 1.279 | 1.293 | 1.306 | 1.320 |
| 15 | Jawa Timur | 18.597 | 18.794 | 18.994 | 19.195 | 19.398 |
| 16 | Banten | 3.099 | 3.131 | 3.165 | 3.198 | 3.232 |
| 17 | Bali | 709 | 717 | 724 | 732 | 740 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 231 | 233 | 236 | 238 | 241 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING KAMBING *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2.090 | 2.112 | 2.135 | 2.157 | 2.180 |
| 20 | Kalimantan Barat | 301 | 305 | 308 | 311 | 314 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 159 | 161 | 163 | 164 | 166 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 |
| 23 | Kalimantan Timur | 410 | 414 | 418 | 423 | 427 |
| 24 | Kalimantan Utara | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 25 | Sulawesi Utara | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.008 | 1.019 | 1.029 | 1.040 | 1.051 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 817 | 826 | 835 | 844 | 853 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 224 | 227 | 229 | 232 | 234 |
| 29 | Gorontalo | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 |
| 30 | Sulawesi Barat | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 |
| 31 | Maluku | 168 | 170 | 171 | 173 | 175 |
| 32 | Maluku Utara | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 |
| 33 | Papua Barat | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 34 | Papua | 210 | 212 | 214 | 217 | 219 |
| | **NASIONAL** | **49.940** | **50.469** | **51.004** | **51.545** | **52.091** |

**PROYEKSI DAGING DOMBA *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 278 | 281 | 284 | 287 | 290 |
| 2 | Sumatera Utara | 459 | 464 | 469 | 474 | 479 |
| 3 | Sumatera Barat | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 4 | Riau | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | Jambi | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 6 | Sumatera Selatan | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 |
| 7 | Bengkulu | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | Lampung | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 12 | Jawa Barat | 32.493 | 32.847 | 33.205 | 33.567 | 33.933 |
| 13 | Jawa Tengah | 4.637 | 4.687 | 4.739 | 4.790 | 4.842 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 1.983 | 2.005 | 2.027 | 2.049 | 2.071 |
| 15 | Jawa Timur | 5.644 | 5.705 | 5.768 | 5.830 | 5.894 |
| 16 | Banten | 2.513 | 2.540 | 2.568 | 2.596 | 2.624 |
| 17 | Bali | - | - | - | - | - |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING DOMBA *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Kalimantan Timur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Kalimantan Utara | - | - | - | - | - |
| 25 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - |
| 26 | Sulawesi Tengah | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27 | Sulawesi Selatan | - | - | - | - | - |
| 28 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - |
| 29 | Gorontalo | - | - | - | - | - |
| 30 | Sulawesi Barat | - | - | - | - | - |
| 31 | Maluku | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | - | - | - | - | - |
| | **NASIONAL** | **48.438** | **48.966** | **49.500** | **50.039** | **50.585** |

**PROYEKSI DAGING BABI *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| 2 | Sumatera Utara | 27.026 | 27.310 | 27.596 | 27.886 | 28.179 |
| 3 | Sumatera Barat | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 |
| 4 | Riau | 994 | 1.005 | 1.015 | 1.026 | 1.037 |
| 5 | Jambi | 134 | 135 | 136 | 138 | 139 |
| 6 | Sumatera Selatan | 211 | 213 | 216 | 218 | 220 |
| 7 | Bengkulu | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | 574 | 580 | 586 | 592 | 598 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 492 | 497 | 502 | 508 | 513 |
| 10 | Kepulauan Riau | 2.244 | 2.267 | 2.291 | 2.315 | 2.340 |
| 11 | DKI Jakarta | 3.558 | 3.596 | 3.633 | 3.672 | 3.710 |
| 12 | Jawa Barat | 746 | 754 | 762 | 770 | 778 |
| 13 | Jawa Tengah | 865 | 875 | 884 | 893 | 902 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| 15 | Jawa Timur | 2.280 | 2.304 | 2.328 | 2.353 | 2.377 |
| 16 | Banten | 2.719 | 2.747 | 2.776 | 2.805 | 2.835 |
| 17 | Bali | 48.402 | 48.910 | 49.424 | 49.943 | 50.467 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING BABI *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 31.366 | 31.695 | 32.028 | 32.364 | 32.704 |
| 20 | Kalimantan Barat | 7.659 | 7.739 | 7.821 | 7.903 | 7.986 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.228 | 1.241 | 1.254 | 1.267 | 1.281 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 23 | Kalimantan Timur | 885 | 894 | 903 | 913 | 922 |
| 24 | Kalimantan Utara | 150 | 151 | 153 | 154 | 156 |
| 25 | Sulawesi Utara | 15.642 | 15.806 | 15.972 | 16.139 | 16.309 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.252 | 1.266 | 1.279 | 1.292 | 1.306 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 3.432 | 3.468 | 3.504 | 3.541 | 3.578 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 610 | 616 | 623 | 629 | 636 |
| 29 | Gorontalo | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 30 | Sulawesi Barat | 439 | 444 | 449 | 453 | 458 |
| 31 | Maluku | 477 | 482 | 487 | 492 | 497 |
| 32 | Maluku Utara | 232 | 234 | 237 | 239 | 242 |
| 33 | Papua Barat | 783 | 791 | 800 | 808 | 817 |
| 34 | Papua | 6.157 | 6.222 | 6.287 | 6.353 | 6.420 |
| | **NASIONAL** | **161.090** | **162.782** | **164.491** | **166.218** | **167.963** |

**PROYEKSI DAGING AYAM BURAS *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 5.586 | 5.639 | 5.693 | 5.747 | 5.801 |
| 2 | Sumatera Utara | 17.973 | 18.143 | 18.316 | 18.490 | 18.665 |
| 3 | Sumatera Barat | 5.345 | 5.395 | 5.447 | 5.498 | 5.551 |
| 4 | Riau | 3.134 | 3.164 | 3.194 | 3.224 | 3.255 |
| 5 | Jambi | 7.640 | 7.713 | 7.786 | 7.860 | 7.934 |
| 6 | Sumatera Selatan | 4.382 | 4.424 | 4.466 | 4.508 | 4.551 |
| 7 | Bengkulu | 4.587 | 4.631 | 4.675 | 4.719 | 4.764 |
| 8 | Lampung | 13.313 | 13.440 | 13.567 | 13.696 | 13.826 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 559 | 564 | 569 | 575 | 580 |
| 10 | Kepulauan Riau | 1.068 | 1.078 | 1.089 | 1.099 | 1.109 |
| 11 | DKI Jakarta | 1.422 | 1.435 | 1.449 | 1.462 | 1.476 |
| 12 | Jawa Barat | 27.123 | 27.381 | 27.641 | 27.904 | 28.169 |
| 13 | Jawa Tengah | 34.430 | 34.757 | 35.087 | 35.421 | 35.757 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 5.352 | 5.403 | 5.455 | 5.506 | 5.559 |
| 15 | Jawa Timur | 50.902 | 51.385 | 51.873 | 52.366 | 52.864 |
| 16 | Banten | 4.150 | 4.190 | 4.230 | 4.270 | 4.310 |
| 17 | Bali | 3.335 | 3.367 | 3.399 | 3.431 | 3.464 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 11.718 | 11.830 | 11.942 | 12.056 | 12.170 |

*lanjutan*

**PROYEKSI DAGING AYAM BURAS *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 11.889 | 12.002 | 12.116 | 12.232 | 12.348 |
| 20 | Kalimantan Barat | 3.229 | 3.259 | 3.290 | 3.322 | 3.353 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2.250 | 2.272 | 2.293 | 2.315 | 2.337 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2.822 | 2.849 | 2.876 | 2.903 | 2.931 |
| 23 | Kalimantan Timur | 5.109 | 5.158 | 5.207 | 5.256 | 5.306 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1.319 | 1.332 | 1.345 | 1.357 | 1.370 |
| 25 | Sulawesi Utara | 2.790 | 2.817 | 2.844 | 2.871 | 2.898 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 8.597 | 8.679 | 8.761 | 8.844 | 8.928 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 26.636 | 26.889 | 27.144 | 27.402 | 27.662 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 12.094 | 12.209 | 12.325 | 12.442 | 12.560 |
| 29 | Gorontalo | 2.489 | 2.512 | 2.536 | 2.560 | 2.585 |
| 30 | Sulawesi Barat | 5.910 | 5.966 | 6.023 | 6.080 | 6.138 |
| 31 | Maluku | 269 | 271 | 274 | 277 | 279 |
| 32 | Maluku Utara | 1.124 | 1.135 | 1.146 | 1.157 | 1.168 |
| 33 | Papua Barat | 1.624 | 1.640 | 1.655 | 1.671 | 1.687 |
| 34 | Papua | 4.933 | 4.980 | 5.028 | 5.075 | 5.124 |
| | **NASIONAL** | **295.106** | **297.910** | **300.740** | **303.597** | **306.481** |

**PROYEKSI DAGING AYAM RAS *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 36.748 | 36.905 | 37.218 | 37.535 | 37.854 |
| 2 | Sumatera Utara | 151.596 | 152.240 | 153.534 | 154.839 | 156.155 |
| 3 | Sumatera Barat | 63.835 | 64.106 | 64.651 | 65.200 | 65.755 |
| 4 | Riau | 106.817 | 107.271 | 108.183 | 109.102 | 110.030 |
| 5 | Jambi | 40.212 | 40.383 | 40.726 | 41.072 | 41.421 |
| 6 | Sumatera Selatan | 95.853 | 96.260 | 97.078 | 97.903 | 98.736 |
| 7 | Bengkulu | 9.491 | 9.531 | 9.612 | 9.694 | 9.776 |
| 8 | Lampung | 99.773 | 100.197 | 101.049 | 101.908 | 102.774 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 21.950 | 22.043 | 22.230 | 22.419 | 22.610 |
| 10 | Kepulauan Riau | 26.297 | 26.408 | 26.633 | 26.859 | 27.088 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 894.386 | 898.187 | 905.822 | 913.522 | 921.286 |
| 13 | Jawa Tengah | 681.384 | 684.280 | 690.096 | 695.962 | 701.878 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 56.504 | 56.744 | 57.227 | 57.713 | 58.204 |
| 15 | Jawa Timur | 506.731 | 508.885 | 513.210 | 517.573 | 521.972 |
| 16 | Banten | 221.342 | 222.282 | 224.172 | 226.077 | 227.999 |
| 17 | Bali | 85.431 | 85.794 | 86.523 | 87.259 | 88.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 33.870 | 34.013 | 34.303 | 34.594 | 34.888 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING AYAM RAS *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 20.807 | 20.895 | 21.073 | 21.252 | 21.432 |
| 20 | Kalimantan Barat | 59.066 | 59.317 | 59.821 | 60.330 | 60.843 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 24.223 | 24.326 | 24.533 | 24.741 | 24.952 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 86.121 | 86.487 | 87.222 | 87.964 | 88.711 |
| 23 | Kalimantan Timur | 46.756 | 46.954 | 47.354 | 47.756 | 48.162 |
| 24 | Kalimantan Utara | 5.162 | 5.184 | 5.228 | 5.272 | 5.317 |
| 25 | Sulawesi Utara | 10.819 | 10.865 | 10.957 | 11.050 | 11.144 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 6.087 | 6.113 | 6.165 | 6.217 | 6.270 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 84.171 | 84.529 | 85.247 | 85.972 | 86.703 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 4.184 | 4.202 | 4.238 | 4.274 | 4.310 |
| 29 | Gorontalo | 3.748 | 3.764 | 3.796 | 3.829 | 3.861 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2.647 | 2.659 | 2.681 | 2.704 | 2.727 |
| 31 | Maluku | 746 | 749 | 756 | 762 | 769 |
| 32 | Maluku Utara | 139 | 140 | 141 | 142 | 144 |
| 33 | Papua Barat | 1.104 | 1.108 | 1.118 | 1.127 | 1.137 |
| 34 | Papua | 7.091 | 7.121 | 7.182 | 7.243 | 7.304 |
| | **NASIONAL** | **3.495.091** | **3.509.945** | **3.539.779** | **3.569.867** | **3.600.211** |

**PROYEKSI DAGING ITIK *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 1.431 | 1.445 | 1.460 | 1.474 | 1.489 |
| 2 | Sumatera Utara | 2.274 | 2.297 | 2.320 | 2.343 | 2.366 |
| 3 | Sumatera Barat | 742 | 749 | 757 | 765 | 772 |
| 4 | Riau | 244 | 247 | 249 | 251 | 254 |
| 5 | Jambi | 568 | 574 | 580 | 586 | 591 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2.522 | 2.547 | 2.573 | 2.598 | 2.624 |
| 7 | Bengkulu | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| 8 | Lampung | 721 | 728 | 736 | 743 | 751 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 10 | Kepulauan Riau | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 11 | DKI Jakarta | 1.172 | 1.184 | 1.195 | 1.207 | 1.219 |
| 12 | Jawa Barat | 6.695 | 6.762 | 6.830 | 6.898 | 6.967 |
| 13 | Jawa Tengah | 4.528 | 4.574 | 4.619 | 4.666 | 4.712 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 416 | 421 | 425 | 429 | 433 |
| 15 | Jawa Timur | 9.049 | 9.139 | 9.230 | 9.323 | 9.416 |
| 16 | Banten | 1.286 | 1.299 | 1.312 | 1.325 | 1.338 |
| 17 | Bali | 318 | 321 | 325 | 328 | 331 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.252 | 1.264 | 1.277 | 1.290 | 1.303 |

***lanjutan***

**PROYEKSI DAGING ITIK *(MEAT YIELD)* TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 |
| 20 | Kalimantan Barat | 307 | 310 | 313 | 316 | 319 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.759 | 1.776 | 1.794 | 1.812 | 1.830 |
| 23 | Kalimantan Timur | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 24 | Kalimantan Utara | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 25 | Sulawesi Utara | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 898 | 907 | 916 | 925 | 934 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2.414 | 2.438 | 2.463 | 2.487 | 2.512 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 387 | 391 | 395 | 399 | 403 |
| 29 | Gorontalo | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 30 | Sulawesi Barat | 225 | 227 | 229 | 232 | 234 |
| 31 | Maluku | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| 32 | Maluku Utara | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
| 33 | Papua Barat | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| 34 | Papua | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| | **NASIONAL** | **40.207** | **40.609** | **41.015** | **41.425** | **41.839** |

**PROYEKSI TELUR AYAM BURAS TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 6.506 | 6.748 | 6.999 | 7.259 | 7.529 |
| 2 | Sumatera Utara | 12.475 | 12.938 | 13.419 | 13.918 | 14.436 |
| 3 | Sumatera Barat | 2.822 | 2.927 | 3.035 | 3.148 | 3.265 |
| 4 | Riau | 14.559 | 15.100 | 15.662 | 16.244 | 16.848 |
| 5 | Jambi | 6.224 | 6.456 | 6.696 | 6.945 | 7.203 |
| 6 | Sumatera Selatan | 9.461 | 9.813 | 10.178 | 10.556 | 10.949 |
| 7 | Bengkulu | 2.796 | 2.900 | 3.008 | 3.120 | 3.236 |
| 8 | Lampung | 9.002 | 9.337 | 9.684 | 10.044 | 10.417 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 788 | 817 | 848 | 879 | 912 |
| 10 | Kepulauan Riau | 651 | 675 | 700 | 726 | 753 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 47.063 | 48.813 | 50.628 | 52.510 | 54.462 |
| 13 | Jawa Tengah | 35.760 | 37.090 | 38.469 | 39.899 | 41.382 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 2.385 | 2.473 | 2.565 | 2.661 | 2.759 |
| 15 | Jawa Timur | 22.261 | 23.088 | 23.947 | 24.837 | 25.760 |
| 16 | Banten | 11.485 | 11.912 | 12.355 | 12.815 | 13.291 |
| 17 | Bali | 1.134 | 1.176 | 1.220 | 1.265 | 1.312 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 3.679 | 3.816 | 3.958 | 4.105 | 4.257 |

*lanjutan*

**PROYEKSI TELUR AYAM BURAS TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 5.282 | 5.478 | 5.682 | 5.893 | 6.112 |
| 20 | Kalimantan Barat | 3.620 | 3.755 | 3.894 | 4.039 | 4.189 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2.544 | 2.639 | 2.737 | 2.839 | 2.944 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 8.819 | 9.147 | 9.487 | 9.840 | 10.205 |
| 23 | Kalimantan Timur | 2.998 | 3.109 | 3.225 | 3.345 | 3.469 |
| 24 | Kalimantan Utara | 774 | 803 | 833 | 864 | 896 |
| 25 | Sulawesi Utara | 2.173 | 2.253 | 2.337 | 2.424 | 2.514 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 3.269 | 3.391 | 3.517 | 3.647 | 3.783 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 20.424 | 21.183 | 21.971 | 22.788 | 23.635 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 7.372 | 7.646 | 7.931 | 8.225 | 8.531 |
| 29 | Gorontalo | 1.146 | 1.188 | 1.232 | 1.278 | 1.326 |
| 30 | Sulawesi Barat | 3.595 | 3.729 | 3.867 | 4.011 | 4.160 |
| 31 | Maluku | 1.636 | 1.696 | 1.760 | 1.825 | 1.893 |
| 32 | Maluku Utara | 472 | 490 | 508 | 527 | 547 |
| 33 | Papua Barat | 990 | 1.027 | 1.065 | 1.105 | 1.146 |
| 34 | Papua | 1.696 | 1.759 | 1.824 | 1.892 | 1.963 |
| | **NASIONAL** | 255.863 | **265.374** | **275.240** | **285.472** | **296.084** |

**PROYEKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 12.555 | 12.804 | 13.057 | 13.315 | 13.578 |
| 2 | Sumatera Utara | 522.562 | 532.893 | 543.428 | 554.172 | 565.127 |
| 3 | Sumatera Barat | 289.752 | 295.480 | 301.322 | 307.279 | 313.353 |
| 4 | Riau | 12.466 | 12.712 | 12.963 | 13.220 | 13.481 |
| 5 | Jambi | 23.151 | 23.609 | 24.075 | 24.551 | 25.037 |
| 6 | Sumatera Selatan | 139.511 | 142.269 | 145.082 | 147.950 | 150.875 |
| 7 | Bengkulu | 11.056 | 11.275 | 11.497 | 11.725 | 11.957 |
| 8 | Lampung | 133.411 | 136.048 | 138.738 | 141.481 | 144.278 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 10.789 | 11.002 | 11.220 | 11.442 | 11.668 |
| 10 | Kepulauan Riau | 14.264 | 14.546 | 14.833 | 15.126 | 15.426 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 478.141 | 487.594 | 497.234 | 507.064 | 517.088 |
| 13 | Jawa Tengah | 509.509 | 519.582 | 529.854 | 540.329 | 551.011 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 64.088 | 65.355 | 66.647 | 67.964 | 69.308 |
| 15 | Jawa Timur | 1.664.766 | 1.697.678 | 1.731.240 | 1.765.466 | 1.800.369 |
| 16 | Banten | 208.416 | 212.537 | 216.738 | 221.023 | 225.393 |
| 17 | Bali | 189.994 | 193.750 | 197.580 | 201.486 | 205.470 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 34.618 | 35.302 | 36.000 | 36.712 | 37.437 |

***lanjutan***

**PROYEKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 9.369 | 9.554 | 9.743 | 9.935 | 10.132 |
| 20 | Kalimantan Barat | 117.684 | 120.010 | 122.383 | 124.802 | 127.270 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 7.537 | 7.686 | 7.838 | 7.993 | 8.151 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 88.492 | 90.242 | 92.026 | 93.845 | 95.700 |
| 23 | Kalimantan Timur | 34.006 | 34.678 | 35.363 | 36.063 | 36.775 |
| 24 | Kalimantan Utara | 619 | 631 | 644 | 656 | 669 |
| 25 | Sulawesi Utara | 27.113 | 27.650 | 28.196 | 28.754 | 29.322 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 14.108 | 14.387 | 14.672 | 14.962 | 15.257 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 198.528 | 202.453 | 206.455 | 210.537 | 214.699 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 2.888 | 2.945 | 3.003 | 3.062 | 3.123 |
| 29 | Gorontalo | 3.895 | 3.972 | 4.050 | 4.130 | 4.212 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2.501 | 2.551 | 2.601 | 2.653 | 2.705 |
| 31 | Maluku | 631 | 644 | 657 | 670 | 683 |
| 32 | Maluku Utara | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 |
| 33 | Papua Barat | 8.388 | 8.554 | 8.723 | 8.896 | 9.072 |
| 34 | Papua | 12.456 | 12.702 | 12.953 | 13.209 | 13.470 |
| | **NASIONAL** | **4.847.355** | **4.943.185** | **5.040.909** | **5.140.566** | **5.242.193** |

**PROYEKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 7.883 | 8.143 | 8.412 | 8.689 | 8.976 |
| 2 | Sumatera Utara | 12.049 | 12.447 | 12.857 | 13.282 | 13.720 |
| 3 | Sumatera Barat | 6.592 | 6.810 | 7.035 | 7.267 | 7.506 |
| 4 | Riau | 1.771 | 1.830 | 1.890 | 1.952 | 2.017 |
| 5 | Jambi | 4.710 | 4.865 | 5.026 | 5.192 | 5.363 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16.993 | 17.554 | 18.133 | 18.731 | 19.349 |
| 7 | Bengkulu | 1.099 | 1.136 | 1.173 | 1.212 | 1.252 |
| 8 | Lampung | 5.976 | 6.174 | 6.377 | 6.588 | 6.805 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 489 | 505 | 522 | 539 | 557 |
| 10 | Kepulauan Riau | 240 | 248 | 256 | 265 | 273 |
| 11 | DKI Jakarta | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 12 | Jawa Barat | 50.105 | 51.758 | 53.466 | 55.231 | 57.053 |
| 13 | Jawa Tengah | 38.332 | 39.596 | 40.903 | 42.253 | 43.647 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 2.314 | 2.391 | 2.469 | 2.551 | 2.635 |
| 15 | Jawa Timur | 42.138 | 43.529 | 44.965 | 46.449 | 47.981 |
| 16 | Banten | 15.032 | 15.528 | 16.040 | 16.569 | 17.116 |
| 17 | Bali | 1.799 | 1.858 | 1.919 | 1.983 | 2.048 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 5.716 | 5.905 | 6.100 | 6.301 | 6.509 |

***lanjutan***

**PROYEKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.216 | 1.256 | 1.298 | 1.341 | 1.385 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2.654 | 2.742 | 2.832 | 2.926 | 3.022 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.732 | 1.789 | 1.848 | 1.909 | 1.972 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 31.440 | 32.478 | 33.549 | 34.656 | 35.800 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.497 | 1.546 | 1.597 | 1.650 | 1.704 |
| 24 | Kalimantan Utara | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 |
| 25 | Sulawesi Utara | 981 | 1.013 | 1.046 | 1.081 | 1.117 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 8.738 | 9.026 | 9.324 | 9.632 | 9.949 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 32.816 | 33.898 | 35.017 | 36.173 | 37.366 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.767 | 3.891 | 4.020 | 4.153 | 4.290 |
| 29 | Gorontalo | 437 | 451 | 466 | 481 | 497 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2.187 | 2.260 | 2.334 | 2.411 | 2.491 |
| 31 | Maluku | 1.137 | 1.174 | 1.213 | 1.253 | 1.294 |
| 32 | Maluku Utara | 479 | 494 | 511 | 528 | 545 |
| 33 | Papua Barat | 600 | 619 | 640 | 661 | 683 |
| 34 | Papua | 593 | 613 | 633 | 654 | 676 |
| | **NASIONAL** | **303.715** | **313.737** | **324.090** | **334.784** | **345.831** |

**PROYEKSI TELUR PUYUH TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 450 | 482 | 517 | 554 | 593 |
| 3 | Sumatera Barat | 2.727 | 2.921 | 3.130 | 3.354 | 3.593 |
| 4 | Riau | 224 | 240 | 257 | 275 | 295 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - |
| 6 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - |
| 7 | Bengkulu | 245 | 262 | 281 | 301 | 323 |
| 8 | Lampung | 434 | 465 | 498 | 534 | 572 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kepulauan Riau | 165 | 177 | 189 | 203 | 217 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 1.612 | 1.727 | 1.851 | 1.983 | 2.125 |
| 13 | Jawa Tengah | 11.539 | 12.364 | 13.247 | 14.193 | 15.207 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 3.201 | 3.430 | 3.675 | 3.937 | 4.219 |
| 15 | Jawa Timur | 5.057 | 5.419 | 5.806 | 6.220 | 6.665 |
| 16 | Banten | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| 17 | Bali | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 106 | 114 | 122 | 131 | 140 |

***lanjutan***

**PROYEKSI TELUR PUYUH TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 20 | Kalimantan Barat | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 80 | 86 | 92 | 98 | 105 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 997 | 1.069 | 1.145 | 1.227 | 1.314 |
| 23 | Kalimantan Timur | 78 | 84 | 90 | 96 | 103 |
| 24 | Kalimantan Utara | - | - | - | - | - |
| 25 | Sulawesi Utara | 298 | 319 | 342 | 367 | 393 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 202 | 216 | 231 | 248 | 266 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 29 | Gorontalo | 72 | 77 | 83 | 88 | 95 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Maluku | - | - | - | - | - |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 |
| | **NASIONAL** | **27.710** | **29.689** | **31.810** | **34.082** | **36.516** |

**PROYEKSI TELUR ITIK MANILA TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 3.797 | 3.850 | 3.904 | 3.959 | 4.015 |
| 3 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - |
| 4 | Riau | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - |
| 6 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - |
| 7 | Bengkulu | 639 | 648 | 657 | 666 | 676 |
| 8 | Lampung | 1.045 | 1.060 | 1.075 | 1.090 | 1.106 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | - | - | - | - | - |
| 10 | Kepulauan Riau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Barat | 15.529 | 15.748 | 15.970 | 16.194 | 16.422 |
| 13 | Jawa Tengah | 2.515 | 2.550 | 2.586 | 2.623 | 2.660 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 387 | 393 | 398 | 404 | 410 |
| 15 | Jawa Timur | 1.717 | 1.741 | 1.766 | 1.791 | 1.816 |
| 16 | Banten | 938 | 951 | 964 | 978 | 992 |
| 17 | Bali | 157 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - |

*lanjutan*

**PROYEKSI TELUR ITIK MANILA TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 |
| 20 | Kalimantan Barat | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| 23 | Kalimantan Timur | 239 | 243 | 246 | 249 | 253 |
| 24 | Kalimantan Utara | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 25 | Sulawesi Utara | 307 | 311 | 316 | 320 | 325 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 489 | 496 | 503 | 510 | 517 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 5.790 | 5.871 | 5.954 | 6.038 | 6.123 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 242 | 245 | 249 | 252 | 256 |
| 29 | Gorontalo | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 |
| 30 | Sulawesi Barat | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 |
| 31 | Maluku | - | - | - | - | - |
| 32 | Maluku Utara | 251 | 254 | 258 | 262 | 265 |
| 33 | Papua Barat | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 34 | Papua | 431 | 437 | 443 | 449 | 455 |
| | **NASIONAL** | **35.161** | **35.656** | **36.158** | **36.667** | **37.183** |

**PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024**
*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 4.174 | 4.283 | 4.398 | 4.522 | 4.653 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.058 | 1.086 | 1.115 | 1.146 | 1.179 |
| 4 | Riau | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 5 | Jambi | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Sumatera Selatan | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 |
| 7 | Bengkulu | 488 | 501 | 514 | 529 | 544 |
| 8 | Lampung | 1.533 | 1.573 | 1.615 | 1.660 | 1.709 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 |
| 10 | Kepulauan Riau | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | DKI Jakarta | 5.211 | 5.346 | 5.490 | 5.644 | 5.808 |
| 12 | Jawa Barat | 299.828 | 307.624 | 315.930 | 324.776 | 334.194 |
| 13 | Jawa Tengah | 102.083 | 104.737 | 107.565 | 110.576 | 113.783 |
| 14 | DI. Yogyakarta | 5.528 | 5.672 | 5.825 | 5.988 | 6.162 |
| 15 | Jawa Timur | 545.686 | 559.874 | 574.991 | 591.091 | 608.232 |
| 16 | Banten | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| 17 | Bali | - | - | - | - | - |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - |

***lanjutan***

**PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024**

*(Ribu Ton)*

| No. | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 20 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - |
| 21 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 24 | Kalimantan Utara | - | - | - | - | - |
| 25 | Sulawesi Utara | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 26 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.960 | 2.011 | 2.066 | 2.123 | 2.185 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 29 | Gorontalo | - | - | - | - | - |
| 30 | Sulawesi Barat | - | - | - | - | - |
| 31 | Maluku | - | - | - | - | - |
| 32 | Maluku Utara | - | - | - | - | - |
| 33 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 34 | Papua | - | - | - | - | - |
| **NASIONAL** | | **968.151** | **993.322** | **1.020.142** | **1.048.706** | **1.079.119** |

## Lampiran 2.
## Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT** | | | | | | | | | **1.299.578** | **2.132.854** | **2.671.790** | **2.976.242** | **3.313.082** |
| **Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak** | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik) | % | 4480,8 ribu ton | | 0,4 | 0,85 | 1,2 | 1,24 | 1,28 | | | | | |
| Peningkatan Produksi susu | % | 944,54 ribu ton | | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | | | | | |
| Peningkatan Produksi telur | % | 5354,62 ribu ton | | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | | | | | |
| **Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan** | | | | | | | | | | | | | |
| Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan | % | US$ 744,3 ribu | | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | |
| **Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak** | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan | % | 81 | | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | | | | | |
| **Tersedianya sarana peternakan** | | | | | | | | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan | % | | | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | | | | | |
| **Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis** | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis | % | 80 | | 80 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | | | | | |
| **Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia** | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia | Kasus | 122 | | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | | | | | |
| **Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima** | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Nilai | | | 32,3 | 32,75 | 33,5 | 34 | 34,5 | | | | | |

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Skala Likert (1-4) | | | 3,37 | 3,44 | 3,51 | 3,55 | 3,58 | | | | | |
| **Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas** | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Nilai | 87,82 | | 88,25 | 88,68 | 88,93 | 90,32 | 90,85 | | | | | |
| **Peningkatan Produksi Pakan Ternak** | | | | | | | | | **77.088** | **155.507** | **194.385** | **242.985** | **303.735** |
| **Terpenuhinya pakan ternak sesuai kebutuhan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi | Ton | | | 26.883.537 | 27.891.703 | 29.011.374 | 30.253.677 | 31.630.622 | | | | | |
| Jumlah pakan ternak kerbau untuk produksi | Ton | | | 1.469.695 | 1.482.922 | 1.498.811 | 1.518.432 | 1.541.926 | | | | | |
| Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi | Ton | | | 14.020.112 | 14.171.382 | 14.322.652 | 14.476.777 | 14.632.198 | | | | | |
| Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi | Ton | | | 9.464.113 | 9.758.424 | 10.052.734 | 10.347.045 | 10.641.356 | | | | | |
| Jumlah pakan ternak itik untuk produksi | Ton | | | 654.948 | 675.315 | 695.682 | 715.475 | 736.417 | | | | | |
| Jumlah pakan ternak babi untuk produksi | Ton | | | 4.374.966 | 4.421.346 | 4.467.323 | 4.514.229 | 4.561.629 | | | | | |
| **Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing) | Ton | | | 6.126.555 | 6.264.828 | 6.413.738 | 6.583.920 | 6.775.375 | | | | | |

**Lampiran 2.**
**Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
**Ditjen PKH Tahun 2020-2024**

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program (*Outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*Output*)/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Terpenuhinya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur | Ton | | | 13.007.193 | 13.280.990 | 13.553.714 | 13.825.116 | 14.102.574 | | | | | |
| **Tersedianya sarana prasarana pakan ternak** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pakan | % | | | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | | | | | |
| **Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan** | | | | | | | | | **171.603** | **306.266** | **362.046** | **416.352** | **478.805** |
| **Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasanpenolakan : kesehatan hewan) | % | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasanpenolakan : kesehatan hewan) | % | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan) | % | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

## Lampiran 2.
## Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
## Ditjen PKH Tahun 2020-2024

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (disesuaikan dinamika populasi) | % | | | 2,74 | 2,74 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | | | | | |
| Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (disesuaikan dinamika populasi) | % | | | 3,21 | 3,21 | 3,15 | 3 | 2,9 | | | | | |
| Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing | % | | | 9,61 | 9,61 | 9,4 | 9,2 | 9 | | | | | |
| Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba | % | | | 8,53 | 8,53 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | | | | | |
| Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras | % | | | 25,51 | 25,51 | 25,4 | 25,3 | 25,2 | | | | | |
| Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging | % | | | 4,42 | 4,42 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | | | | | |
| Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik | % | | | 9,01 | 9,01 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | | | | | |
| Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi | % | | | 19,53 | 19,53 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | | | | | |

**Lampiran 2.**
**Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
**Ditjen PKH Tahun 2020-2024**

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program (*Outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*Output*)/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis | % | 80 | | 80 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | | | | | |
| **Meningkatnya kesehatan ternak perah** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah | % | | | 3,79 | 2,94 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | | | | | |
| **Meningkatnya kesehatan ayam petelur** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur | % | | | 4,24 | 4,24 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | | | | | |
| **Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan | % | | | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | | | | | |
| **Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak** | | | | | | | | | **619.446** | **1.175.866** | **1.501.005** | **1.674.350** | **1.851.718** |
| **Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak) | % | | | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan produksi** | | Pusat | | 2.261.847 | | | |
| Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 2.142.648 | 2.223.000 | 2.312.239 | 2.411.252 | 2.520.996 |
| Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 130.162 | 131.333 | 132.741 | 134.478 | 136.559 |
| Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 3.977.698 | 4.019.912 | 4.062.127 | 4.105.137 | 4.148.945 |
| Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 4.629.869 | 4.680.526 | 4.731.183 | 4.782.796 | 4.834.409 |
| Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 3.004.480.237 | 3.097.912.245 | 3.191.344.252 | 3.284.776.260 | 3.378.208.267 |
| Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 30.770.385 | 31.727.269 | 32.684.153 | 33.614.037 | 34.597.921 |
| Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi | Ekor | | 3.995.403 | 4.037.355 | 4.079.747 | 4.122.584 | 4.165.871 |
| **Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan** | | Pusat | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak sapi potong yang diajukan | Ekor | | 2.657.090 | 2.757.261 | 2.868.590 | 2.992.134 | 3.129.092 |
| Jumlah betina produktif ternak kerbau potong yang diajukan | Ekor | | 372.372 | 376.361 | 381.288 | 387.188 | 394.104 |

**Lampiran 2.**
**Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
**Ditjen PKH Tahun 2020-2024**

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program (*Outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*Output*)/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah betina produktif ternak kambing potong yang diajukan | Ekor | | | 3.672.382 | 3.687.696 | 3.703.072 | 3.718.514 | 3.734.019 | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak domba potong yang diajukan | Ekor | | | 3.606.858 | 3.685.921 | 3.766.718 | 3.849.285 | 3.933.662 | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak ayam yang diajukan | Ekor | | | 17.350.891 | 17.890.461 | 18.430.031 | 18.969.602 | 19.509.172 | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak itik yang diajukan | Ekor | | | 190.883 | 196.819 | 202.691 | 208.691 | 214.627 | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak babi potong yang diajukan | Ekor | | | 463.131 | 477.213 | 491.770 | 506.749 | 522.203 | | | | | |
| **Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan | % | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan | % | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| **Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan | % | | | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | | |

## Lampiran 2.
## Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
## Ditjen PKH Tahun 2020-2024

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Produksi susu | Ton | | | 968.150 | 993.320 | 1.020.140 | 1.048.710 | 1.079.120 | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu | Ekor | | | 308.160 | 315.115 | 322.605 | 331.165 | 340.795 | | | | | |
| **Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Produksi telur | Ton | | | 4.795.165 | 4.896.101 | 4.996.643 | 5.096.696 | 5.198.982 | | | | | |
| Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur | Ekor | | | 267.913.341 | 273.552.827 | 279.170.226 | 284.760.370 | 290.475.270 | | | | | |
| **Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasana perbibitan dan produksi ternak | % | | | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | | | | | |
| **Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)** | | | | | | | | | **30.369** | **76.816** | **92.947** | **102.242** | **112.466** |
| **Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk** | | | Pusat | | | | | | | | | | |

## Lampiran 2.
## Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negera tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk) | % | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| **Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong | % | 15,7 | | 17,5 | 20,2 | 23,8 | 28,3 | 33,7 | | | | | |
| Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong | % | 48,3 | | 51,3 | 52 | 52,8 | 53,5 | 54,3 | | | | | |
| Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong | % | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | | | | | |
| **Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan | % | 81 | | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | | | | | |

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia | Kasus | 122 | | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | | | | | |
| **Meningkatnya produk susu dan telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan | % | 88 | | 88,2 | 88,5 | 89 | 89,2 | 89,5 | | | | | |
| Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan | % | 95 | | 95,2 | 95,5 | 95,7 | 96 | 96,2 | | | | | |
| **Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner | % | 90 | | 90 | 92 | 93 | 95 | 95 | | | | | |
| **Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak** | | | | | | | | | **25.829** | **65.484** | **87.438** | **100.554** | **120.664** |
| **Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Nilai ekspor hewan hidup | US$ 000 | 66.038 | | 75.944 | 87.335 | 104.802 | 131.003 | 170.304 | | | | | |
| Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan | US$ 000 | 523.890 | | 602.474 | 692.845 | 831.414 | 1.039.267 | 1.351.047 | | | | | |
| Nilai ekspor produk non pangan | US$ 000 | 138.127 | | 158.846 | 182.673 | 219.208 | 274.010 | 356.213 | | | | | |

## Lampiran 2.
## Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

| Program/Kegiatan/ Sasaran Program *(Outcome)*/ Sasaran Kegiatan *(Output)*/ Indikator | Satuan | *Baseline* | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nilai ekspor obat hewan | US$ 000 | 14.127 | | 16.245 | 18.682 | 22.419 | 28.023 | 36.430 | | | | | |
| Nilai ekspor benih dan bibit ternak | US$ 000 | 2.196 | | 2.526 | 2.905 | 3.486 | 4.357 | 5.664 | | | | | |
| Pertumbuhan unit usaha peternakan | % | 1,49 | | 1,88 | 2,59 | 3,64 | 4,26 | 5,14 | | | | | |
| **Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Tingkat kemanfaatan sarana prasana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan | % | 5,60 | | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | | | | | |
| **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan** | | | | | | | | | **375.243** | **352.915** | **433.969** | **439.759** | **445.694** |
| **Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Nilai | | | 32,3 | 32,75 | 33,5 | 34 | 35,5 | | | | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Skala Likert (1-4) | | | 3,37 | 3,44 | 3,51 | 3,55 | 3,58 | | | | | |
| **Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas** | | | Pusat | | | | | | | | | | |
| Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Nilai | 87,82 | | 88,25 | 88,68 | 88,93 | 90,32 | 90,85 | | | | | |

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**Kementerian Pertanian Gedung C**
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan,
Jakarta 12550
Telp. : (021) 7815380-4
Fax. : (021) 7815486-7815586
website : https://ditjenpkh.pertanian.go.id